

PENGELOLAAN DAS BATANG HARI HULU :

*Diantara Tekanan Pasar
dan Kebijakan Otonomi Daerah*

Oleh :
Rusli Cahyadi
Fadjri Alihar
Gutomo Bayu Aji
Temi Indriati Miranda



PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(PPK - LIPI) 2004

A B S T R A K

Telah mejadi semacam wacana umum bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat dalam kerangka bioregion dan bukan kerangka administratif pemerintahan. DAS Batang Hari yang meliputi dua Propinsi (Sumatera Barat dan Jambi) termasuk salah satu DAS yang hendak dikelola melalui pendekatan ini. Akan tetapi pada pelaksanaannya banyak persoalan yang kemudian menjadikan rencana ideal hanya sebatas idealisme elit pemerintah. Sulit untuk menemukan bagaimana pendekatan ideal tersebut diimplementasikan dilapangan. Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan kesenjangan antara yang ideal dan praktek dilapangan. Beberapa faktor yang diangkat dalam tulisan ini adalah persoalan hubungan pusat dan daerah (antara propinsi disatu pihak dan kabupaten, kecamatan serta nagari disisi lain) dalam kerangka otonomi daerah. Kedua persoalan ekspektasi terhadap fungsi "tradisional" daerah hulu Batang Hari (Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok) sebagai wilayah pemasok kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan. Persoalan ekspektasi pasar dan beroperasinya modal menjadi persoalan. Isu lain yang menjadi persoalan menyangkut pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana halnya berbagai daerah lain di Indonesia otonomi daerah lebih dipandang sebagai kesempatan untuk meningkatkan PAD. Implikasi lain dari otonomi daerah pada kasus ini adalah kebijakan kembali ke Nagari, yang ironisnya pada beberapa kasus justru meningkatkan "semangat" masyarakat lokal untuk memanfaatkan SDA mereka (dengan terlibat dalam illegal logging) atas nama otonomi dan kepemilikan komunal (hak ulayat Nagari).

Kata kunci:

Daerah Aliran Sungai, Hulu Batang Hari, Lembah Gumanti, Otonomi Daerah, Hak Ulayat Nagari.

KATA PENGANTAR

Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari dapat dikatakan sebagai salah satu sungai yang “penting” di Indonesia, terkait misalnya dengan, tingkat kerusakan dan klasifikasinya sebagai sungai Nasional. Berbagai aktifitas manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di DAS Batang Hari telah mengakibatkan penurunan kualitas DAS secara keseluruhan. Hal ini ditandai oleh menurunnya kualitas air, bencana banjir serta longsor yang kian sering terjadi.

Penetapan DAS Batang Hari sebagai DAS Nasional juga mempunyai implikasi yang negatif, karena pengelolaannya yang berada dibawah wewenang pemerintah pusat sering memunculkan persoalan saling lepas tanggungjawab diantara kedua propinsi yang sebagian wilayahnya dilalui oleh DAS Batang Hari yaitu Propinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Ditingkat lokal persoalan ini membawa implikasi yang lebih rumit lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disamping dua persoalan besar di tingkat nasional tersebut terdapat pula persoalan-persoalan lokal yang juga membawa implikasi serius bagi penurunan kualitas DAS Batang Hari. Otonomi Daerah, kebijakan kembali ke Nagari, posisi “tradisional” yang kian diperkuat oleh pasar merupakan persoalan-persoalan yang mengemuka dalam laporan penelitian ini.

Beberapa pokok yang dibahas dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pengelolaan DAS Batang Hari secara keseluruhan.

Sebagai sebuah laporan, tulisan ini tentu masih memiliki banyak kelemahan oleh karena itu masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan ini dimasa mendatang.

Jakarta, Desember 2004
Kepala Pusat Penelitian
Kependudukan
(PPK-LIPI)

Dr. Ir. Aswatini, MA
NIP. 320003450

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Sasaran Penelitian	5
E. Kerangka Analitik	5
F. Lokasi Penelitian	7
BAB II SETING WILAYAH	9
A. Kabupaten Solok	9
B. Kecamatan Lembah Gumanti	13
C. Kondisi Hulu Sungai Batang Hari	19
BAB III KEGIATAN-KEGIATAN PENTING DISEKITAR DAS BATANG HARI HULU	21
A. Pertanian	21
B. Sektor Perkebunan	30
C. Sektor Perikanan dan Peternakan	30
D. Pertambangan	32
E. Pariwisata	33
BAB IV PERSOALAN POTENSI LOKAL DALAM PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM DI BATANG HARI HULU	35
A. Pengantar	35
B. Persoalan dalam Pengelolaan SDA di Hulu Batang Hari	35
C. Otonomi Daerah dan Potensi Pengelolaan SDA	38
D. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA	41
E. Prakarsa Penting dalam Pengelolaan SDA	43
BAB V PENGELOLAAN DAS BATANG HARI HULU DAN TEKANAN PASAR	47
A. Pendahuluan	47
B. Pengelolaan DAS Batang Hari Hulu	48
C. Penduduk dan Lahan	51

	Halaman
D. Tekanan Pasar	54
E. Strategi Adaptasi	57
BAB 6 KESIMPULAN	61
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Keterangan Gambar	Hal
1.	Panorama danau Di atas, salah satu potensi yang dimiliki	11
2.	Nagari Alahan Panjang dari atas bukit	13
3.	Kegiatan pertanian di Alahan Panjang	21
4.	Kebun Markisa, salah satu komoditas andalan	23
5.	Seperti halnya Markisa, Strawberry Alahan Panjang dipasarkan hingga ke Jakarta.	25
6.	Gejala erosi adalah hal yang “umum” ditemui di Alahan Panjang	27
7.	Peti buah dan sayuran, yang menjadi persoalan adalah bahan baku yang menggunakan kayu-kayu dari hutan setempat.	29
8.	Hutan gundul yang mudah ditemui di daerah Alahan Panjang dan Solok.	36

DAFTAR TABEL

Nomor	Keterangan Tabel	Hal
Tabel 1.	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan Pertanian	10
Tabel 2.	Kemiringan Lahan di Kabupaten Solok	12
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Menurut Nagari dan Jenis Kelamin	14
Tabel 4.	Jumlah Pendudukan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	14
Tabel 5.	Luas Panen dan Produksi Kentang pada Kecamatan Penghasil Sayuran, Tahun 2002	15
Tabel 6.	Luas Panen dan Produksi Kubis pada Kecamatan Penghasil Sayuran, Tahun 2002	15
Tabel 7.	Kegiatan-kegiatan Besar di Kawasan Hulu DAS Sungai Batang Hari. 2003	49
Tabel 8.	Jenis Pupuk dan Pestisida yang Digunakan Petani di Wilayah Kecamatan Lembah Gumanti	56

A. Latar Belakang

Departemen Kehutanan Republik Indonesia mendefinisikan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai... suatu daerah tertentu yang sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utamanya (*single outlet*). Satu DAS dipisahkan dari wilayah lain disekitarnya (DAS-DAS lain) oleh pemisah dan topografi, seperti punggung perbukitan dan pegunungan (Departemen Kehutanan : SK Menhut 52/Kpts-II/2001).

Selanjutnya SK tersebut juga mengatur klasifikasi DAS berdasarkan 'hamparan wilayah dan fungsi strategisnya kedalam tiga klasifikasi, yaitu (1) DAS lokal, terletak secara utuh berada di di satu daerah kabupaten/kota, dan/ atau DAS yang secara potensial hanya dimanfaatkan oleh satu daerah kabupaten/kota, (2) DAS Regional, letaknya secara geografis melewati lebih dari satu daerah kota/kabupaten; dan/atau DAS lokal yang atas usulan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh pemerintah propinsi, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan regional; dan (3) DAS Nasional, letaknya secara geografis melewati lebih dari dari satu daerah propinsi, dan/atau DAS yang secara potensial dimanfaatkan oleh lebih dari satu daerah propinsi, dan/ atau DAS regional yang atas usulan pemerintah propinsi yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh pemerintah pusat, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan nasional (Departemen Kehutanan, 2001)

Berdasarkan berbagai definisi, karakteristik dan 'wilayah pengelolaannya' Indonesia memiliki banyak DAS dan berpuluh-puluh sub-DAS. Dari 85 DAS utama yang telah dikaji, hampir 70 persen diantaranya telah mengalami degradasi yang cukup parah (Suryana, 2002 dan Berita Iptek, 2002). Studi dari Suryana (2002), mengkonfirmasi tingkat keparahan yang cukup signifikan. Pada tahun 1985 terdapat DAS yang mengalami kondisi kritis. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, jumlah DAS yang mengalami degradasi

meningkat hampir tiga kali lipat. Adapun DAS yang dianggap mengalami kerusakan antara lain DAS Citarum, DAS Mahakam, DAS Meratus, DAS Kerinci dan DAS Batang Hari; untuk menyebut beberapa contoh.

Penyebab utama kerusakan DAS adalah perubahan fungsi peruntukan lahan dan pemanfaatan sungai yang tidak terdesain dengan baik. Sebagai contoh, untuk DAS yang berkaitan dengan daerah industri dan perkotaan, lahan yang semula merupakan jalur hijau beralih fungsi menjadi kawasan industri dan permukiman. Aliran sungai yang semula digunakan sebagai sumber air bersih, telah berubah menjadi tempat pembuangan limbah, baik oleh pabrik maupun rumah tangga.

Informasi dari Jatim, sebuah jejaring LSM yang peduli masalah pertambangan dan Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal), secara tegas menyebutkan bahwa tingginya sedimentasi disebabkan oleh erosi yang timbul karena adanya penebangan pohon-pohon yang berfungsi sebagai penahan air (Jatam 2000, Bapedal 2000). Penebangan pohon dan pembongkaran tanah dapat dilakukan oleh (1) pemegang konsesi kehutanan (HPH), (2) pemegang ijin penambangan, (3) aktivitas 'illegal logging and mining' dan (4) aktivitas pertanian. Tentunya masing-masing aktivitas menimbulkan besaran dampak yang berbeda, sesuai dengan skala kegiatan yang berbeda pula. Penebangan hutan dan penggalian bahan tambang yang sporadic, tentunya mempunyai *magnitude* yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan perladangan yang dilakukan oleh sebuah unit keluarga dalam setahun

Untuk mengantisipasi dan merehabilitasi kerusakan DAS, maka Departemen Kehutanan menawarkan konsep Pengelolaan DAS Terpadu, yang didefinisikan sebagai... konsep pembangunan yang mengakomodasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana berjangka pendek, menengah maupun panjang yang memuat perumusan masalah spesifik didalam DAS, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan dan pelestarian sumber daya alam air, tanah dan vegetasi, pengembangan sumber daya manusia, arahan model pengelolaan DAS serta sistem monitoring evaluasi kegiatan pengelolaan DAS (Departemen Kehutan, 2001)

Sebuah pengelolaan DAS Terpadu mempunyai indikator-indikator keberhasilan, diantaranya adalah (1) produksi yang berkelanjutan, (2) kerusakan lahan dan air minimum, (3) distribusi hasil air yang berkualitas dan kuantitas baik, (4) teknologi yang dipakai dapat diterima, dan (5) mensejahterakan seluruh masyarakat yang terkait (Hikmad Lukman, 2001)

Dua di antara 85 DAS yang telah dikaji oleh pemerintah, dan dianggap mengalami kerusakan berat berdasarkan versi Departemen Kehutanan, yaitu DAS Mahakam di propinsi Kalimantan Timur, dan DAS Batang Hari, yang *outlet* aliran sungai utamanya melewati propinsi Sumatera Barat dan Jambi. Kedua DAS ini tampaknya menarik untuk didalami secara khusus. Ada beberapa alasan untuk memberikan perhatian pada dua DAS tersebut, yaitu (1) perbedaan 'wilayah pengelolaan', yaitu DAS Mahakam sebagai DAS regional dan DAS Batang Hari sebagai DAS nasional, (2) mewakili dua pulau besar di Indonesia yang mempunyai isu laju kerusakan hutan yang tinggi, dan (3) adanya berbagai persamaan dan perbedaan mengenai sumber-sumber utama kerusakan ekosistem DAS, sehingga dapat dibandingkan (4) adanya inisiatif-inisiatif pengelolaan yang bersifat unik di antara kedua DAS tersebut, seperti pengelolaan DAS Mahakam dengan mengundang model negara lain, dan pengelolaan DAS Batang Hari yang dibidani oleh LSM lokal dengan upaya kolaboratif dengan Pemerintah Daerah, (5) adanya inisiatif dari pemerintah daerah untuk mengundang peneliti LIPI untuk melakukan kajian mengenai DAS di wilayahnya.

DAS Batang Hari

Mengikuti kriteria 'hamparan dan fungsi strategis' DAS dari Departemen Kehutanan, maka DAS Batang Hari dapat diklasifikasikan sebagai DAS Nasional. Kriteria ini mengikuti fakta, bahwa DAS Batang Hari melintasi propinsi Sumatera Barat dan propinsi Jambi. Dengan kondisi ini, maka kerjasama lintas propinsi menjadi suatu keniscayaan.

Sebagai DAS terbesar kedua di Sumatera dengan jumlah luas daerah tangkapan air (water catchment area) 4,9 juta hektar dan secara administratif meliputi propinsi Sumatera Barat dan Jambi yang terbagi dalam 6 Sub-DAS.

Seperti halnya ancaman kerusakan yang ada di wilayah DAS lainnya, di DAS Batang Hari-pun rata-rata kerusakan DAS mencapai 125 ha/th. Luas tutupan hutan di DAS Batang Hari tinggal 32,683 km², atau sekitar 26% saja. Akibatnya dapat dilihat bahwa Erosi di Batang Hari rata-rata 604,939 ton/th. Apabila dilihat lebih rinci lagi, pada tahun 1996 baru mencapai 3,3 juta ton sedangkan tahun 2002 sudah mencapai 5,89 juta ton. Akibat kerusakan hutan termasuk penebangan, pengangkutan dan pembangunan jalan untuk memuat kayu, sedimen naik 10-20 kali

Selain itu, kontribusi dari adanya pertambangan, perkebunan dan adanya lahan transmigrasi juga menyebabkan semakin cepatnya kerusakan ekosistem DAS Batang Hari. Akibatnya, banjir bandang yang seringkali melanda wilayah DAS hilir menyebabkan kerugian material yang sangat signifikan.

Demikian pula dengan kehancuran biota sungai. Pada sisi lainnya, sedimentasi menjadi ancaman serius untuk transportasi, termasuk membahayakan kelangsungan Pelabuhan Samudera di daerah Jambi.

Sejauh ini memang telah ada beberapa inisiatif lokal yang dilakukan pada tingkat pembuat kebijakan, seperti lokakarya multi pihak antara pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat dan Jambi, khususnya kabupaten/kota yang dialiri sungai Batang Hari. Untuk membuat nota kesepakatan dalam pengelolaan DAS Batang Hari.

B. Perumusan Masalah

Salah satu keuntungan sekaligus persoalan penting yang dimiliki oleh wilayah hulu adalah pada umumnya wilayah tersebut adalah wilayah yang subur. Eksploitasi/pemanfaatan wilayah hulu DAS Batang Hari menjadi penting untuk diperhatikan mengingat posisinya yang berada dibagian paling atas dari ekosistem DAS. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal serta pihak lain mempengaruhi kondisinya. Pemanfaatan SDA di hulu DAS bukan hanya diakibatkan oleh kebutuhan masyarakat setempat, berbagai persoalan dan tekanan dari luar juga mempengaruhi pola pemanfaatannya. Sebagai wilayah pertanian misalnya, berbagai tekanan dari luar ikut mempengaruhi bagaimana wilayah tersebut dimanfaatkan.

Beberapa pertanyaan umum yang dapat diajukan adalah :

- (1) Bagaimana kondisi daya dukung lingkungan daerah Hulu DAS Batang Hari?
- (2) Pihak mana saja yang memanfaatkannya ? Bagaimana pola pemanfaatannya?
- (3) Bagaimana pengaruh dari luar terhadap pola pemanfaatannya?

C. Tujuan

Tujuan Umum

Mengkaji pola pemanfaatan daerah Hulu DAS Batang Hari serta bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi DAS.

Tujuan Khusus

Mempelajari kondisi daya dukung lingkungan daerah hulu DAS.
Mengidentifikasi dan mengkaji peran pihak-pihak yang memanfaatkan serta polanya pemanfaatannya

Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor dari luar apa saja yang mempengaruhinya.

D. Sasaran Penelitian

Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan, perencana pembangunan dan para pihak yang berkepentingan dalam menyusun kebijakan pengelolaan DAS Terpadu

Sebagai suatu metode untuk mengembangkan kerjasama antara Pusat Penelitian dan Pemerintah Daerah setempat, serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam desentralisasi pengelolaan DAS

E. Kerangka Analitik

Penelitian ini akan melihat implikasi teori pembangunan yang terlanjutkan (*sustainable development*) terhadap pengelolaan DAS. Terdapat dua prinsip dasar dari sustainable development, yaitu keseimbangan antara pemanfaatan sosial ekonomi dan pemanfaatan ekologi, atau *economically valuable and ecologically sound*. Dua prinsip keseimbangan ini, pada perkembangannya ditambah pula dengan beberapa prinsip lainnya, seperti *culturally appropriate* dan *social equity* (IIRR, 2002).

Dengan prinsip keseimbangan ekologi, maka ada tiga hal yang perlu digaris-bawahi, yaitu (1) manajemen pengelolaan yang ramah lingkungan, (2) dinamika hubungan manusia dan lingkungannya, dan (3) cara-cara peningkatan standar kehidupan masyarakat tanpa harus membawa efek negatif terhadap lingkungan. Sedangkan *economically viable*, berarti keuntungan ekonomin yang maksimal akan diperoleh dari produksi yang optimal.

Prinsip *culturally appropriate* mengemuka, karena adanya kondisi budaya yang unik dari negara-negara dunia ketiga, dimana model-model pembangunan yang berasal dari negara-negara lain belum tentu dapat dilaksanakan. Artinya sebuah model pembangunan yang akan diterapkan harus sensitif dengan budaya lokal. Sedangkan dari prinsip *social equity*, terdapat beberapa hal yang penting untuk digaris-bawahi, diantaranya upaya pencapaian partisipasi komunitas dan kesetimbangan. Dengan demikian, isu-isu partisipasi, akses dan kontrol atas sumber daya alam menjadi sangat penting dibawah tema *social equity*.

Ekosistem DAS, yang terdiri dari berbagai sub-ekosistem, seperti daerah hulu, hilir, sungai, dan muara merupakan lingkungan fisik yang mempunyai

potensi sumber daya alam potensial, seperti hasil hutan, barang tambang, lahan pertanian, sumber perikanan, dan sumber air. Lingkungan ini dipengaruhi dan mempengaruhi aktivitas manusia, melalui kegiatan pertanian, industri kehutanan, industri pertambangan, penangkapan ikan, dan kebutuhan rumah tangga. Karena adanya aktivitas manusia, maka lingkungan akan berubah, dan lingkungan yang berubah membutuhkan pola adaptasi yang baru dari manusia yang mendiaminya, demikian seterusnya.

Diasumsikan ada dua pola pemanfaatan sumber daya DAS, yaitu *sustainable* (berlanjut) dan *unsustainable* (tidak berlanjut). Pemanfaatan yang mengikuti kaidah-kaidah 'keberlanjutan' akan menjadikan struktur dan fungsi DAS optimum bagi kehidupan manusia; indikator keberhasilan DAS yang pada intinya berisi faktor-faktor 'teknis-hidrologis dan 'sosial-ekonomi akan mempunyai nilai yang tinggi. Selanjutnya masyarakat yang ada di wilayah DAS akan meningkat kesejahteraannya.

Tetapi, berbagai fakta menunjukkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan DAS, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah ternyata tidak mengikuti kaidah-kaidah pembangunan yang berlanjut. Eksploitasi berlebih dengan hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi tidak ramah lingkungan. Demikian halnya dengan instrumen-instrumen pengelolaan tidak tertata dengan baik. Pemerintah tidak mempunyai aturan dan penegakan aturan (*rule of law*) yang memadai; pihak swasta mengeruk sumber daya hutan dan tambang dengan hanya memikirkan keuntungan jangka pendek; masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan. Akibatnya, terjadi degradasi sumber daya alam DAS dan diiringi dengan kerusakan ekosistem DAS. Indikator kerusakan DAS terjadi, yaitu frekuensi banjir yang semakin tinggi, sedimentasi yang tinggi, longsor tanah, kurangnya debit air dan buruknya kualitas baku mutu air; dan perikanan di wilayah DAS mengalami penurunan hasil. Kombinasi tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan DAS dan kerusakan lingkungan, merupakan bentuk-bentuk marjinalisasi yang pada intinya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tergantung dengan ekosistem DAS.

Proses peminggiran kelompok-kelompok masyarakat tertentu dari arena pembangunan, dapat saja dilakukan secara 'disadari atau 'tidak disadari oleh pemerintah. Disadari maksudnya adalah secara sistematis pemerintah tidak memberikan ruang pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan, implementasi hingga monitoring dan evaluasi suatu kegiatan. Masyarakat dianggap hanya penerima pasif kegiatan pembangunan. Sedangkan proses yang 'tidak disadari dapat dilihat dari pemahaman yang keliru mengenai 'partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Seringkali mobilisasi massa melalui program-program padat karya, penyuluhan dan

'rapat desa telah dianggap sebagai partisipasi sejati dan telah melibatkan masyarakat. Padahal keinginan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, implementasi hingga monitoring tidak terwujud.

Marjinalisasi mempunyai hubungan yang dekat dengan permasalahan kemiskinan. Hal ini dapat terjadi, karena seringkali kelompok-kelompok yang dimarginalkan itu tertutup akses dan kontrolnya terhadap pengelolaan sumber daya yang vital bagi mereka. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan dalam membicarakan kemiskinan, yaitu: (1) sebab-sebab kemiskinan; (2) pengukuran kemiskinan (?), **standar BPS?** dan (3) upaya-upaya penanggulangannya.

Dalam kaitannya dengan marjinalisasi ini, terdapat suatu varian kemiskinan yang disebut kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang timbul bukan karena sifatnya individual tetapi kemiskinan yang dialami sekelompok masyarakat; dan bukan pula karena satu sebab, tetapi berbagai sebab yang berbelit dan melilit kondisi kelompok penduduk (Soemardjan, 1979). Penyebab kemiskinannya bukan hanya permasalahan ekonomi, tetapi jalin menjalin antara faktor politik, budaya, dan ekonomi. Oleh sebab itu pengukurannya pun menjadi tidak hanya berdasarkan formula baku mengenai tingkat pendapatan, pengeluaran ataupun kalori per kapita. Demikian halnya ketika menginjak pada upaya untuk menanggulangi kemiskinan, seringkali berbagai program penanggulangan kemiskinan mengalami kegagalan, karena gagalnya menentukan target siapa masyarakat miskin, lalu model program apa yang tepat untuk berbagai kelompok miskin yang berbeda.

F. Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan di Kecamatan Alahan Panjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

A. Kabupaten Solok

Sumatera barat terletak di bagian barat pantai Sumatera, Propinsi Sumatera Barat berada di antara 0° 54' Lintang Utara, 3° 30' Lintang Selatan serta 98° 36' dan 101° 53' Bujur Timur, dengan luas wilayah 42,2 ribu km² yang juga meliputi wilayah kepulauan, sebagian besarnya merupakan daerah kepulauan Mentawai. Daerah Sumatera Barat dilintasi oleh Bukit Barisan yang membujur dari utara ke selatan sehingga keadaan topografinya sangat bervariasi mulai dari datar, landai sampai curam dan pegunungan dengan ketinggian sekitar 1 M sampai 2.912 M di atas permukaan laut.

Berdasarkan data BPS tahun 2000 jumlah penduduk Propinsi Sumatera Barat 4.241.605 jiwa. Sementara itu telah terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 1980-1990 sebesar 1,62 persen menjadi 1,57 persen pada periode tahun 1990-2000. Kondisi ini diiringi pula dengan penurunan angka fertilitas total dari 3,4 tahun 1997 menjadi 2,91 perseribu penduduk pada tahun 1999 dan penurunan angka kematian bayi dari 60,3 perseri kelahiran periode 1990-1995 menjadi 50 perseribu kelahiran pada tahun 2000.

Sumatera barat memiliki sumber daya alam yang potensial bagi pengembangan ekonomi dimasa yang akan datang terutama dibidang pertanian, pariwisata, pertambangan dan energi. Di bidang pertanian pada umumnya merupakan usaha berskala kecil tetapi ada juga yang berskala besar antara lain usaha perkebunan kelapa sawit, gambir, kopi, kayu manis dan karet yang terdapat di beberapa kabupaten antara lain: kabupaten Pasaman, kabupaten Solok, kabupaten Agam, dan kabupaten Sawalunto/Sijunjung. Luas perkebunan rakyat saat ini adalah 421.576 Ha. Hasil pertanian tanaman pangan berkembang baik di Sumatera Barat, antara lain padi, palawija, buah-buahan dan sayur-sayuran tetapi masih diusahakan secara kecil-kecilan dengan manajemen yang masih tradisional.

Sedangkan kabupaten Solok merupakan salah satu dari 17 Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang berada di jajaran Bukit Barisan dengan kondisi topografi yang bergelombang, berbukit dan berlembah temperatur 12.5°C - 31.5°C. Wilayah ini berada pada ketinggian 280 M - 2.100 M dari permukaan

laut dengan curah hujan antara 1.600 - 4.000 mm. Kabupaten ini terdiri dari 19 kecamatan dengan 82 Nagari dengan jumlah penduduk 747.757 jiwa dari 101.628 KK. Mata pencaharian utama penduduknya adalah petani dengan presentasi 73% .

Luas Wilayah kabupaten Solok sebesar 708.42 Ha merupakan wilayah terluas nomor dua di propinsi Sumatera Barat. Wilayah kabupaten ini di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah selatan dengan Kabupaten Kerinci (Prop. Jambi), bagian barat dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, dan bagian timur dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Dengan kondisi topografi yang beragam dan berbukit, daerah ini memiliki banyak sungai baik sungai besar maupun sungai kecil yang merupakan sumber air yang mendukung segala kegiatan usaha tani. Sungai-sungai itu termasuk kedalam DAS Kuantan dan DAS Batang Hari dengan panjang sungai 798.950 M .

Akibat tersedianya air yang memadai, seperti telah dikatakan bahwa amat mendukung terciptanya potensi lahan yang cukup beragam pula mulai dari lahan peruntukan tanaman pangan dan hortikultura sampai perkebunan. Dari keseluruhan luas wilayah, terdapat 14,76% merupakan lahan produktif yang di pergunakan selama ini untuk komoditas pertanian (*Handbook of Solok* : tt)

Tabel.1. Jenis dan Luas Penggunaan Lahan Pertanian

Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
Sawah	33.348	4,71
Pekarangan	14.191	2,00
Tegalan	33.502	4,73
Ladang	23.508	3,32
Penggembalaan/ padang rumput	9.453	1,33
Perkebunan	46.044	6,50
Hutan rakyat	74.535	10,52
Hutan Negara	309.708	6,50
Kolam	629	0,09
Rawa (yang di tumbuhi rumput)	12	-
Sementara tidak di usahakan	10.891	1,54
Lain-lain	152.599	21,54
Jumlah	708.420	100,00

Sumber: Handbook of Solok, 2003



1. Panorama danau Di atas, salah satu potensi yang dimiliki

Hasil pertanian yang terkenal dari kabupaten ini adalah "Bareh Solok" dengan luas lahan padi 33.242 Ha. Wilayah ini juga merupakan pemasok utama tanaman hortikultura/ sayuran : kentang kol, bawang merah, cabe dan lain-lain, serta satu-satunya penghasil buah markisa di Sumatera Barat. Selain itu, tempat ini juga merupakan salah satu penghasil benih jagung hybrida yang dikenal dengan benih jagung Andalas 4 (A4), yang berada di Kenagarian Saningbakar Kecamatan X Koto Singkarak.

Dataran tinggi Alahan Panjang yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti dikelilingi oleh tiga danau dan pegunungan merupakan daerah penghasil sayuran terbesar di Sumatera Barat dan pemasok sayuran bagi propinsi tetangga seperti : Riau, Jambi dan lain-lain. Buah markisa salah satu buah khas yang terdapat di Nagari Ai Dingin, Lembah Gumanti - Kabupaten Solok yang tumbuh subur sekitar danau Kembar dan Danau Talang dan saat ini tengah dikembangkan juga tanaman strawberry dengan pertumbuhan yang cukup baik.

Potensi ini tersebar di beberapa kecamatan dengan luas yang bervariasi, antara 200 - 3.000 Ha. Khusus untuk wilayah dataran tinggi lebih dari 700 m dari permukaan laut, kelerengan 15% - 40% bagi kegiatan pertanian mencapai 5.900 Ha, tersebar di tujuh kecamatan. Dan untuk daerah di bawah 700 m dari permukaan laut terdapat lahan seluas 5.700 Ha yang tersebar di tiga kecamatan.

Table 2. Kemiringan Lahan di Kabupaten Solok

Kemiringan	Luas	Persentase	Keterangan
< 5%	49.401	6,97	Datar
6-10%	91.147	12,87	Berombak
11-15%	209.968	29,64	Berbukit

Sumber: *Hand Book Of Solok, 2003*

Di bidang peternakan Kabupaten Solok juga merupakan sentra *fattening* dan *breeding* ternak swasta PT Bhumi Solinda. di Arian Kecamatan X Koto Singkarak. dan masyarakat, kabupaten ini juga mempunyai pasar ternak terbesar yaitu Pasar ternak Muara Panas di Kecamatan Bukit Sundi.

Dalam Segi kepariwisataan, Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki tempat rekreasi paling banyak mulai dari wisata budaya, wisata gunung, wisata alam, wisata air panas, wisata danau, serta agrowisata. Hal ini ditunjang oleh kondisi alam yang bervariasi mulai dataran rendah sampai dataran tinggi.

Danau Diatas, merupakan satu dari danau yang disebut Danau Kembar terletak di dataran tinggi Alahan Panjang 25 km sebelah timur Ibukota Kabupaten Solok Kayu Aro yang dikelilingi oleh lahan pertanian hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan markisa dan kesemek. Lokasi yang mudah dijangkau karena berada di tepi jalan raya.

Danau Dibawah, juga bagian dari danau kembar terletak di sebelah selatan danau Diatas 1 km yang dikelilingi oleh perbukitan di dataran tinggi yang dingin, berada di Kecamatan Lembah Gumanti dan Lembang Jaya. Penduduk sekitar danau bertani tanaman hortikultura sebagai mata pencaharian utama.

Danau Talang, Obyek wisata danau Talang terletak 2 Km dari danau Kembar yang diapit oleh perbukitan dengan suasana yang tenang dan sejuk dengan areal pertanian hortikultura terdiri dari sayur dan buah markisa dan perkebunan seperti kopi dan teh.

Danau Singkarak, Obyek wisata danau Singkarak 10 Km dari Kota Solok dan 35 Km dari kayu Aro, terletak di tepi jalan raya Solok Bukitinggi. Danau Singkarak berada di dua kabupaten yang berada di perbatasan Nagari Kacang yaitu antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau Singkarak memiliki satu-satunya ikan dengan spesies khas danau Singkarak dan satu-

satunya di dunia, masyarakat setempat menyebutnya ikan Bilih, dan merupakan mata pencaharian utama nelayan di sekitar danau.

B. Kecamatan Lembah Gumanti

Kecamatan Lembah Gumanti merupakan salah satu kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di kabupaten Solok. Terletak 1.450 M diatas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Gumanti yaitu, bagian barat dengan kecamatan Danau Kembar dan Kabupaten Pesisir Selatan, bagian selatan dengan kecamatan Pantai Cermin, bagian timur dengan kecamatan Hiliran Gumanti dan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Payung Sekaki.



2. Nagari Alahan Panjang dari atas bukit

Sebelum diberlakukan Perda No.4/2001 di kecamatan Lembah Gumanti terdapat 19 desa dan 4 kerapatan Adat Nagari. Perubahan paradigma pemerintahan dan bentuk pemerintahan desa ke bentuk pemerintahan Nagari menjadikan kecamatan Lembah Gumanti terdiri dari 4 Nagari yaitu Nagari Alahan Panjang, Nagari Sunagai Nanam, Nagari Salipat dan Nagari Aia Dingin. Seluruh proses pelaksanaan perubahan system pemerintahan dari desa menuju nagari yang sesuai dengan perda No.4/2001 selesai pada bulan September 2001.

Jumlah penduduk di kecamatan Lembah Gumanti adalah 44.543 jiwa, dengan komposisi penduduk jumlah laki-laki 21.873 jiwa dan perempuan 22.670 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Nagari Sungai Nanam dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Nagari Salimpat.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Nagari dan Jenis Kelamin

Nagari	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Ai Dingin	4240	4555	8795
Salimpat	3034	3059	6093
Alahan Panjang	6553	6999	13552
Sungai Nanam	8046	8057	16103
Jumlah	21873	22670	44543

Sumber: Kecamatan Lembah Gumanti dalam Angka 2002

Sedangkan jumlah penduduk terbesar ada pada kelompok umur 0-19 tahun hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran di kecamatan ini tinggi. Disamping itu pada kelompok umur tersebut rata-rata merupakan kelompok umur usia sekolah sehingga dibutuhkannya sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Kecamatan Lembah Gumanti memiliki sarana pendidikan yang memadai diantaranya 8 taman kanak-kanak, 34 buah sekolah dasar, 6 buah sekolah lanjutan pertama yang terdiri dari 4 buah sekolah negeri dan 2 buah sekolah swasta, dan 2 buah sekolah lanjutan atas yang terdiri dari 1 buah sekolah negeri dan 1 buah berstatus swasta.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	2570	2452	5022
5 - 9	2672	2572	5244
10 - 14	2687	2610	5297
15 - 19	2497	2549	5046
20 - 24	1585	1883	3563
25 - 29	1585	1700	3285
30 - 34	1378	1487	2865
35 - 39	1433	1614	3047
40 - 44	1370	1413	2783
45 - 49	1197	1096	2293
50 - 54	701	661	1362
55 - 59	520	585	1105
60 - 64	568	651	1219
65 - 74	394	526	920
75 - 79	362	474	836
80 +	259	397	656
Jumlah	21873	22670	44543

Sumber: Kecamatan Lembah Gumanti dalam Angka 2002

Letak dari kecamatan Lembah Gumanti ini merupakan wilayah dataran tinggi, menjadikan tempat ini mempunyai suhu yang tepat untuk bercocok tanam yaitu 18 c-26 c. Terutama untuk tanaman padi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu terdapatnya pemandangan yang indah ditambah

adanya danau kembar yaitu danau Di atas dan danau Di bawah menjadikan nilai plus kecamatan Lembah Gumanti untuk dijadikan objek pariwisata yang menjanjikan apabila di tangani dengan serius dan profesional.

Secara umum penduduk kecamatan Lembah Gumanti berprofesi sebagai petani, selain padi dan sayur-sayuran, Markisa merupakan tanaman primadona yang ada di wilayah ini sebagai tanaman pendamping padi atau sayur-mayur. Hampir disetiap ladang dan pekarangan rumah penduduk terdapat tanaman buah markisa. Selama ini masyarakat merasakan bahwa buah markisa memiliki pasar yang cukup menjanjikan.

Kecamatan ini merupakan wilayah yang produksi sayur-mayurnya terbesar sekabupaten Solok. Hal ini bisa dilihat pada tabel hasil produksi sayur di kabupaten Solok. Berikut beberapa tabel produksi sayuran Sekabupaten Solok

Tabel 5. Luas Panen dan Produksi Kentang pada Kecamatan Penghasil Sayuran Tahun 2002

Kecamatan	Total area (Ha)	Produksi (Ton)	Productivity (ton/Ha)
Lembah gumanti	430	8820	20,51
Lembang jaya	192	3888	20,25
Danau kembar	314	6372	20,29
Pantai cermin	-	-	-
Payung sekaki	16,50	324	19,64
Gunung talang	39	774	19,85
Sangir	18,50	342	18,49
Sei. Pagu	-	-	-

Sumber: Handbook of solok, 2003

Tabel 6. Luas Panen dan Produksi Kubis pada Kecamatan Penghasil Sayuran Tahun 2002

Kecamatan	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)
Lembah gumanti	809	34391	42,51
Lembang jaya	240	10183	42,43
Danau kembar	273	11584	42,43
Pantai cermin	-	-	-
Payung sekaki	24	1019	42,46
Gunung talang	46	1930	41,96
Sangir	20	839	41,95
Sei. Pagu	-	-	-

Sumber: Handbook of solok, 2003

Nagari-nagari di Kecamatan Lembah Gumanti ini memiliki karakteristik tersendiri pada hasil pertanian mereka walaupun kesuburan tanah dan suhu hampir sama. Tapi bukan berarti satu jenis tanaman akan hanya ditemui disatu nagari saja. Contohnya buah strawberry akan mudah ditemui di Nagari Salimpat, sedangkan Markisa yang terkenal berasal dari Nagari Ai dingin, hampir di setiap rumah di nagari ini menanam buah markisa dan sayur-mayur terdapat di Alahan panjang.

Penduduk di kecamatan ini terbiasa menjual hasil yang mereka tanam sendiri. Mereka tidak menggunakan jasa pengumpul ataupun koperasi untuk pendistribusian hasil tanam mereka. Banyak dari para petani tersebut memiliki truk untuk menjual hasil pertaniannya langsung ke pasar atau mereka biasa berkumpul dalam satu truk, umumnya 5 sampai 10 petani untuk mendistribusikan hasil pertanian mereka ke pasar. Jadi selain sebagai petani, mereka pun berprofesi sebagai pedagang.

Hasil pertanian di wilayah ini telah mampu dipasarkan keluar wilayah kecamatan Lembah Gumanti, bahkan ke luar propinsi, seperti Riau, Jambi, Palembang bahkan sampai ke Pulau Jawa. Dalam hal ini pasar berperan penting dalam pendistribusian hasil pertanian mereka. Pada hari-hari tertentu terdapatnya hari pasar untuk mendistribusikan hasil pertanian mereka dalam jumlah besar. Tetapi tidak hanya menjual di pasar ini orang luar kecamatan pun mendatangkan hasil pertanian mereka untuk di jual di kecamatan ini juga dengan jumlah yang besar.

Petani yang juga berprofesi sebagai pedagang hasil pertanian memutuskan mata rantai perjalanan barang dan berdampak pada harga. Karena mereka sendiri yang menanam dan membawa hasil pertanian ke pasar, maka mereka pula yang menentukan harga. Seringkali naik turunnya harga satu komoditi membuat menentukan dengan cepat apa yang akan mereka tanam pada musim tanam berikutnya. Selain itu naik turunnya harga yang cepat seringkali menciptakan kondisi pasar yang tidak sehat dan berefek pada tanaman yang mereka tanam. Apabila suatu jenis produksi harganya sedang tidak baik atau murah maka para petani tidak segan-segan memusnahkan hasil pertaniannya atau tidak lagi mereka tanam sebaliknya apabila ada hasil produksi harganya naik maka mereka berlomba-lomba memproduksi lagi begitu seterusnya.

Jadi, tidak heran apabila kita tidak lagi menemukan satu jenis hasil pertanian padahal kondisi tanahnya memungkinkan satu produksi itu dapat tumbuh dengan baik di wilayah ini hanya karena alasan harga yang terlalu murah. Contohnya buah *strawberry* karena harganya menurun tajam pada satu nagari di kecamatan ini akan jarang dijumpai.

Wilayah pertanian yang dianggap paling berhasil di Kecamatan Lembah Gumanti terletak di Nagari Alahan panjang, banyak sekali warga nagari ini menyewakan lahannya untuk di gunakan bercocok tanam oleh warga nagari tetangga. Hal ini dikarenakan nagari ini merupakan wilayah subur dan paling cocok untuk bercocok tanam sayur-sayuran, buah-buahan dan palawija.

Nagari Alahan Panjang, merupakan wilayah yang subur dan berhawa sejuk dengan tingkat kesejahteraan yang baik. Wilayah yang mudah dicapai dengan berbagai alat transportasi umum dari ibukota propinsi maupun dari ibukota kabupaten, dan merupakan pensuplai sayur-mayur terbesar sekabupaten Solok membuat tempat ini dikenal sampai ke pelosok propinsi.

Nagari ini termasuk dalam wilayah kecamatan Lembah Gumanti. Terletak di pinggiran Danau Di atas yang merupakan hulu dari Sungai Batang Hari, wilayah ini terdapat di ketinggian 1458 M- 1680 M dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 18^o-26^o. Bentang lahan di wilayah ini tidak terdapat dataran rendah. Di wilayah ini terdapat 782 Ha dataran tinggi dan 3129,5 Ha lahan perbukitan atau pegunungan.

Nagari Alahan Panjang berbatasan dengan Nagari Sungai Nanam di sebelah utara, sedangkan sebelah selatan dengan Nagari Ai Dingin, Sebelah barat dengan Nagari Danau Kembar, dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Salipat.

Untuk menuju ke kecamatan terdapat jarak tempuh sejauh 1 Km, menuju ibukota kabupaten sejauh 34 Km dan untuk mencapai ke ibukota propinsi 66 Km. Sedangkan waktu yang ditempuh ke ibukota kecamatan 15 menit, ke ibukota kabupaten 90 menit dan waktu ke fasilitas terdekat seperti pasar, puskesmas ataupun kantor nagari 10 menit.

Kondisi tanah di Nagari ini cukup beragam, dari 1704 Ha terdapat 420 Ha yang dinyatakan sangat subur, 500 Ha dalam kategori subur, 260 Ha dikatakan sedang dan 524 Ha tidak subur atau kritis. Pada tingkat erosi tanah di wilayah ini terdapat 280 Ha dalam kategori erosi sedang. Terdapat pula 524 Ha lahan kritis dan 398 Ha lahan terlantar. Hutan juga masih terdapat di wilayah ini yaitu seluas 1224 Ha.

Danau juga memberikan kontribusi bagi masyarakat Nagari Alahan Panjang. Sebagian wilayah nagari ini terdapat di sisi Danau Di atas yaitu seluas 300 Ha. Danau tersebut dimanfaatkan oleh warga dengan memiliki keramba di pinggir danau tersebut. Selain itu danau juga dimanfaatkan dalam segi pariwisata walaupun belum mendapatkan penanganan secara professional.

Jumlah penduduk wilayah ini adalah 13.551 jiwa dari 2.853 kepala keluarga terdiri dari 6.477 jiwa laki-laki dan 7.074 jiwa perempuan. Sebagian besar penduduk di Nagari Alahan Panjang ini bekerja di bidang pertanian. Selain pertanian, industri kecil yaitu berupa kerajinan rakyat juga cukup diminati oleh penduduk Nagari Alahan Panjang. Pertambangan galian dan sektor perikanan dengan kepemilikan keramba juga diminati sebagai mata pencaharian oleh penduduk Nagari Alahan Panjang.

Dari 2.853 kepala keluarga yang ada di Nagari ini, seluruhnya memiliki lahan untuk bercocok tanam. Hanya 211 KK memiliki lahan kurang dari 0,1 Ha, sebagian besar warga memiliki lahan lebih dari 1 Ha, bahkan lebih dari 1000 kepala keluarga memiliki lahan lebih dari 3 Ha. Termasuk di dalamnya 690 KK memiliki lahan lebih dari 10 Ha.

Di Nagari Alahan Panjang terdiri dari sepuluh Jorong atau dusun yaitu : Dusun Usak, Dusun Tarakan Talp, Dusun Tarakan Galundi, Dusun Taluak Dalam, Dusun Panglian Kayu, Dusun Laweh Alp, Dusun Galagah, Dusun Batu Putih, Dusun Batang Hari dan Dusun Alahan panjang sendiri.

Wilayah ini merupakan dataran yang paling tinggi di Kabupaten Solok, sehingga ditempat inilah berbagai macam sayur-mayur dan buah-buahan tumbuh. Maka tidak mengherankan apabila Nagari Alahan Panjang merupakan wilayah pensuplay sayur-mayur terbesar di Kabupaten Solok, bahkan hasil buminya juga tidak hanya memenuhi kebutuhan sayur warga se kabupaten Solok saja tetapi sudah mampu untuk dijual keluar propinsi Sumatera Barat seperti, Riau, Pekan baru, Palembang, bahkan Jakarta. Selain itu, buah markisa menjadi tanaman "wajib" bagi warga Alahan Panjang, hampir di setiap rumah akan kita temui pohon markisa, disamping cocok dengan kondisi alamnya harganya juga cukup menjanjikan.

Di tempat ini terdapat pasar yang dinamakan "Pasar Sarikat" dibentuk berdasarkan kesepakatan atau perserikatan dari tujuh nagari untuk membuat pasar di tempat ini. Sedangkan gudang sayurnya terdapat di Nagari Sungai Nanam. Pasar ini hanya ada satu minggu sekali, tepatnya dihari sabtu. Di pasar ini terjadi transaksi besar, yaitu melibatkan jual-beli dalam jumlah bertruk-truk sayur dan buah-buahan. Pembelinya berasal dari berbagai wilayah di Sumatera Barat, bahkan juga dari luar propinsi yaitu dari Palembang, Pekan Baru. Menurut aparat Nagari Alahan Panjang apabila hari pasar berlangsung, omsetnya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Di pasar ini para petani langsung menjual hasil panen mereka. Secara individu atau berkelompok mereka menjual sendiri hasil panen mereka. Akibatnya seperti yang telah dijabarkan sebelumnya mereka pula lah yang

menentukan harga. Yang lebih ironisnya adalah para pendatang yang membeli hasil bumi tersebut tidak selamanya datang dengan tangan hampa, mereka juga membawa hasil bumi untuk dijual di Pasar Sarikat ini, dan seringkali barang yang dijualpun merupakan barang yang sama dengan yang akan mereka beli, sehingga dapat menjatuhkan barang lokal begitu pula sebaliknya apabila kualitas barang lokal baik maka otomatis menjatuhkan barang yang datang. Tidak mengherankan apabila di pasar ini harga berfluktuasi dengan cepat.

C. Kondisi Hulu Sungai Batang Hari

Berdasarkan data dari "Evaluasi hasil interpretasi citra satelit kerusakan lingkungan Daerah Aliran Sungai Batang Hari" bahwa aktifitas pembangunan suatu wilayah DAS secara nyata mempengaruhi kondisi sumber daya tanah di wilayah tersebut. Beberapa aktifitas yang mempengaruhi kondisi tanah diantaranya adalah pembukaan wilayah hutan untuk dijadikan areal perkebunan atau pertanian, perubahan fungsi dari hutan menjadi areal budidaya, pengusahaan areal pertanian dan perkebunan tanpa kaedah konservasi tanah dan air, pembabatan wilayah hutan tanpa adanya upaya penghutanan kembali dan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah DAS. Kegiatan yang ada tersebut membuat terjadinya degradasi tanah dan penurunan kualitas tanah yang ada di wilayah DAS Batang Hari.

Selain itu, sifat kimia tanah juga mempengaruhi penurunan kesuburan tanah yang ada di DAS Batang Hari, serta terjadinya peningkatan laju erosi akibat dari kerusakan fisik tanah dan tata guna lahan dari kondisi hutan menjadi areal budidaya atau areal terbuka. Juga berpengaruh pada penurunan kualitas air sungai dan peningkatan sedimentasi. Gangguan fungsi hidrologi juga terjadi di sini, terutama pada DAS bagian hulu (*upper watershed*). Gangguan ini berhubungan dengan penurunan kemampuan tanah dalam menyerap, meloloskan dan menyimpan air akibat kerusakan fisik tanah. Akibatnya terjadinya fluktuasi debit sungai yang cukup besar antara musim penghujan dan musim kemarau. Disamping itu juga terjadi ketimpangan ketersediaan air permukaan dan terganggunya kontinuitas debit sungai sepanjang waktu pada sungai-sungai yang terdapat di wilayah DAS Batang Hari.

Kawasan DAS Batang Hari berdasarkan pengukuran planimeter mempunyai luas 542.958 Ha, namun berdasarkan hasil interpretasi kawasan yang masih berhutan yaitu seluas 539.361 Ha yang berarti terjadi pengurangan luas hutan (kondisi hutan kritis) seluas 3.597 Ha. Penyebab berkurangnya luas hutan karena adanya berbagai kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman. Selain itu ada juga kegiatan perkebunan pada kawasan hutan produksi dan hutan

yang dapat di konversi, Juga terdapatnya penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat di sepanjang kawasan sempadan sungai maupun kawasan konversi lainnya.

Adanya perubahan fungsi hutan menjadi areal penggunaan lain seperti hutan tanaman maupun perkebunan diprediksi akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan yaitu, peningkatan laju erosi, penurunan kualitas air permukaan, perubahan iklim lokal, terjadinya migrasi satwa liar yang dilindungi, berkurangnya keanekaragaman hayati flora endemic dan terganggunya fungsi DAS Batang Hari sebagai daerah resapan air.

DAS Batang Hari, seharusnya kurang lebih 542,958 Ha seharusnya berfungsi sebagai kawasan hutan baik sebagai hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW), hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi maupun hutan yang dapat di konversi. Pada kenyataannya telah terjadi perubahan peruntukan antara lain perubahan kawasan hutan menjadi lahan perkebunan sawit, perubahan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri dan adanya perubahan peruntukan dari lahan budidaya menjadi pertambangan batubara. Dan yang paling dominant di DAS Batang Hari adalah perubahan vegetasi tanaman dari poli kultur menjadi mono kultur yang dapat menimbulkan dampak penurunan kesuburan lahan dan timbulnya hama penyakit tanaman.

**KEGIATAN-KEGIATAN PENTING
DISEKITAR DAS BATANG HARI HULU**

Seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu dijelaskan bahwa kondisi fisik Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok termasuk daerah yang paling subur, sehingga daerah tersebut merupakan daerah surplus beras dan buah-buah tidak hanya di Kabupaten Solok sendiri, melainkan juga di Propinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya pada bagian ini akan diuraikan berbagai kegiatan penduduk yang menonjol di Kecamatan Lembah Gumanti yang berdampak terhadap pengelolaan DAS Batang Hari.

A. Pertanian

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Lembah Gumanti dan Kabupaten Solok pada umumnya sangat tergantung pada sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena tanahnya sangat subur karena mengandung unsur hara yang sangat kaya. Tingginya tingkat kesuburan tanahnya telah mengakibatkan sebagian besar penduduk di daerah tersebut sangat bergantung hidupnya pada sektor pertanian dengan komoditas utamanya adalah padi dan sayur-sayuran. Selain itu, daerah tersebut juga sebagai daerah penghasil peternakan dan perikanan. Kecamatan Lembah Gumanti merupakan salah satu kecamatan diantara tiga kecamatan utama di Kabupaten Solok sebagai daerah penghasil beras dan sayur-sayuran.



Mengingat besarnya potensi sumber daya alam telah mengakibatkan Kecamatan Lembah Gumanti mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. Hal ini ditunjang dengan kondisi geografis daerah tersebut yang terletak di kawasan dataran tinggi dengan keadaan topografi yang landai dan luas. Kondisi topografi tersebut sangat menunjang dan baik bagi pertumbuhan sayur-sayuran. Tanaman sayur-sayuran tersebut telah lama dibudidayakan oleh masyarakat setempat secara turun temurun. Kecamatan Lembah Gumanti dikenal juga sebagai daerah penghasil ternak dan perikanan di Kabupaten Solok pada khususnya dan Propinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Salah satu daerah pertanian yang paling subur di Kecamatan Lembah Gumanti adalah Nagari Alahan Panjang dan Air Dingin Kedua nagari tersebut dikategorikan sebagai daerah yang cukup maju. Hal ini dikarenakan tanah di Nagari Alahan Panjang dan Air Dingin sangat subur dan ini berdampak terhadap kegiatan masyarakat atau penduduknya yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian. Selain itu budaya masyarakat daerah tersebut yang sangat terbuka pada masyarakat pendatang. Keadaan tersebut telah mendorong masyarakat Kecamatan Lembah Gumanti berani bersaing secara sehat dengan penduduk pendatang. Sebagai akibatnya pembangunan sektor pertanian di daerah tersebut semakin maju dan berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

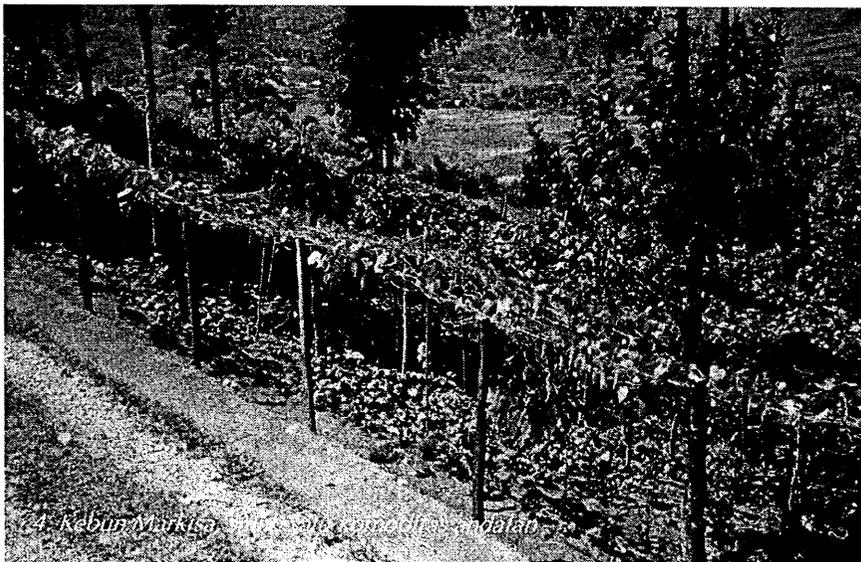
Kesuburan tanah di nagari tersebut sangat ditunjang dengan keberadaan irigasi yang sangat memadai. Faktor ketersediaan irigasi tersebut telah berdampak terhadap meningkatnya kegiatan sektor pertanian yang dilakukan oleh penduduk setempat. Seperti diketahui ketersediaan air merupakan faktor penunjang utama dalam kegiatan pertanian. Irigasi merupakan fenomena yang khusus di Kecamatan Lembah Gumanti yang terlihat sangat teratur dan bersih. Hal ini dimungkinkan dapat dilakukan karena karena ketersediaan air yang cukup karena di sekitar Kecamatan Lembah Gumanti terdapat hulu sungai Batang Hari dan danau Diatas. Selain bekerja disektor pertanian, banyak pula diantara penduduk di Kecamatan Lembah Gumanti yang bekerja sebagai guru, pedagang, pegawai negeri dan lain-lain.

Seperti diketahui bahwa Kecamatan Lembah Gumanti merupakan hulunya Sungai Batang Hari yang tepatnya terletak di desa Air Dingin. Desa tersebut terletak di daerah pegunungan yang hampir berbatasan dengan Taman Nasional Sebelat, Kerinci. Kegiatan pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti diusahakan penduduk secara intensif. Artinya sepanjang tahun tanah pertanian di daerah tersebut terus dikerjakan. Sektor pertanian yang paling banyak dilakukan penduduk adalah bercocok tanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran yang paling menonjol ditanam penduduk adalah sayuran kol (kubis), tomat, cabe, kentang dan bawang merah.

Ada tiga jenis produksi pertanian utama yang dihasilkan di Kecamatan Lembah Gumanti yaitu kubis/kol, bawang merah dan kentang. Luas tanaman kol di daerah tersebut mencapai 809 Ha dengan produksi 35 ribu ton per-tahun. Luas lahan tanaman bawang merah sebesar 606 Ha dengan produksi 5.500 ton setiap tahunnya. Sedangkan untuk tanaman kentang jumlah areal yang ditanam hanya 450 Ha dengan produksi sekitar 9 ribu ton setiap tahunnya.

Buah-buahan yang paling banyak ditanam penduduk di Kecamatan Lembah Gumanti adalah pisang dan jeruk. Luas tanaman pisan yang ada di daerah tersebut mencapai 19.000 batang dengan produksi sekitar 600 ton pisang. Pisang tersebut kebanyakan dipasarkan ke Solok dan Kota Padang. Hanya saja banyak produksi pisang di Kecamatan Lembah Gumanti yang tidak dapat diserap oleh pasar dan tidak dapat pula diolah selanjutnya karena terbatasnya teknologi untuk pengolahannya. Buah-buahan lainnya yang banyak ditanam penduduk adalah jeruk yang jumlahnya mencapai 16 ribu batang dengan produksi 60 ton per-tahun. Jenis buah-buahan lainnya yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti adalah buah strawberi. Buah strawberi tersebut paling banyak ditanam penduduk di nagari Alahan Panjang.

Selain itu, di Kecamatan Lembah Gumanti juga banyak dijumpai penduduk yang menanam buah markisa. Buah markisa tersebut paling banyak ditanam penduduk di Nagari Air Dingin. Kondisi iklimnya yang dingin merupakan tempat yang cocok bagi tumbuhan buah markisa. Fenomena yang tampak bahwa setiap rumah di Nagari Air Dingin memiliki tanaman buah markisa. Kebanyakan buah markisa tersebut dipasarkan ke Solok dan Kota Padang.



Penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti terlihat sangat intensif tidak hanya dari segi pembukaan lahan, melainkan juga dari segi penggunaan pupuk dan pestisida. Dari beberapa pengamatan tampak tanah-tanah yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti tidak ada yang kosong dan hampir semuanya digunakan sebagai daerah untuk kegiatan pertanian, kecuali di daerah yang terjal dan berbatu. Semuanya ini merupakan bukti bahwa tanah di daerah memang sangat subur untuk kegiatan di sektor pertanian. Banyaknya penduduk yang beraktifitas di sektor pertanian telah mengakibatkan tanah-tanah di Kecamatan Lembah Gumanti seperti berselimut tumbuhan sayur-sayuran yang tampak hijau dimana-mana.

Dari beberapa hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa kegiatan pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti telah dilakukan penduduk sejak dulu kala secara turun temurun. Dari dahulu nenek moyang penduduk di Kecamatan Lembah Gumanti telah mengusahakan lahan pertanian secara penduduk. Artinya kegiatan pertanian tersebut memang sengaja dikerjakan secara intensif agar dapat menghasilkan produksi secara maksimal. Hanya bedanya kegiatan pertanian dimasa lalu tidak perlu menggunakan pupuk atau peptisida, tetapi menurut beberapa narasumber kegiatan pertanian sekarang ini di Kecamatan Lembah Gumanti mutlak menggunakan ke dua jenis bahan kimia tersebut, beberapa informan menyatakan bahwa penggunaan pestisida dan pupuk telah mulai dikenal sejak tahun 1970-an. Mereka mengatakan bahwa tanah pertanian di daerah tersebut telah mengalami kejenuhan.

Menurut beberapa informasi yang dimuat di beberapa harian surat kabar local menjelaskan bahwa penggunaan peptisidan dan pupuk dalam berbagai kegiatan pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti telah mencapai titik yang sangat membahayakan. Semuanya ini dikarenakan padatnya kegiatan pertanian di daerah tersebut. Dari beberapa pengamatan terlihat tidak lahan-lahan yang kosong dan semuanya terisi dengan tanaman pertanian. Salah satu fenomena menarik adalah bahwa suburnya lahan pertanian merupakan factor penarik bagi pendatang, terutama dari penduduk nagari (desa) tetangga. Berhubung para pendatang tersebut tidak memiliki tanah, maka banyak diantara mereka yang menyewa lahan pertanian kepada penduduk lokal. Biasanya mereka menyewa lahan penduduk lokal kebanyakan dengan menggunakan uang dan bukan dengan system bagi hasil.

Dengan kata lain bahwa keseimbangan lingkungan di Kecamatan Lembah Gumanti saat ini telah terganggu sebagai akibat tidak terkontrolnya kegiatan penduduk di sektor pertanian. Tidak sistem pertukaran lahan atau tanah pertanian telah mengakibatkan berbagai unsur hara yang ada di dalam tanah tidak mampu lagi memberi makan terhadap tumbuhan yang ada di atasnya. Seyogyanya setiap beberapa tahun sekali diadakan tukar tempat terhadap

kegiatan pertanian, sehingga lahan tidak mengalami kejenuhan. Namun yang terjadi adalah lahan yang subur di Kecamatan Lembah Gumanti sepanjang tahun terus ditanami, sehingga berdampak terhadap menurunnya kesuburan tanah di daerah tersebut yang juga berdampak terhadap penurunan produksi pertanian.

Sebagai akibatnya kegiatan pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti pada khususnya dan Kabupaten Solok pada umumnya sangat tergantung kepada bantuan pupuk. Pupuk sebenarnya merupakan suplemen dari kegiatan di sektor pertanian, bukan merupakan bagian utama dari kegiatan tersebut. Mengingat kesuburan tanah di Kecamatan Lembah Gumanti telah mengalami penurunan yang sangat parah, maka pupuk telah menjadi andalan utama bagi peningkatan produksi sektor pertanian di daerah tersebut. Beberapa penuturan yang disampaikan oleh kalangan petani strawberi mengatakan bahwa apabila kegiatan pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti tidak ditunjang dengan pupuk, maka tidak akan dicapai hasil yang maksimal. Hal ini terlihat pada lahan pertanian yang ditanami strawberi yang tampak tumbuh secara meranggas dan buahnya kecil-kecil karena tidak diberi pupuk. Para petani tersebut menjelaskan bahwa apabila segera diberi pupuk, maka buahnya akan besar-besar.



Buah-buahan lainnya yang banyak ditanam penduduk di Kecamatan Lembah Gumanti adalah tomat. Tomat juga merupakan salah satu komoditi penting yang bisa dijadikan sumber penghasilan penduduk di daerah tersebut. Tomat yang berasal dari Kecamatan Lembah Gumanti sangat dikenal karena

buahnya yang besar-besar. Namun seperti halnya buah strawberi ternyata tomat tersebut juga tidak terlepas dari ketergantungan pupuk untuk pertumbuhannya. Tanpa dibantu oleh pupuk buah tomatnya tidak akan pernah besar dan semuanya ini menunjukkan bahwa tanah atau lahan di Kecamatan Lembah Gumanti telah mengalami kejenuhan. Sebagai akibatnya tumbuhan yang ada di atasnya harus dibantu dengan penyediaan pupuk secara terus-menerus karena tanahnya telah kehilangan unsur hara yang sangat parah.

Selain intensitas penggunaan pupuk yang sangat tinggi ternyata aktivitas pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti juga harus ditunjang dengan penggunaan peptisida. Peptisida tersebut sangat penting terutama untuk mengusir atau membasmi hama tanaman yang selama ini sangat merajalela. Fenomena penggunaan peptisida tersebut secara tak langsung menunjukkan bahwa keseimbangan ekologi sudah mulai terganggu. Hama tanaman yang dulunya dimakan oleh burung ternyata sekarang berkembang-biak secara pesat karena pemangsanya cenderung mengalami penurunan. Hal ini terutama disebabkan karena burung-burung tersebut banyak yang diburu oleh penduduk, sehingga populasinya menurun dan jumlah tidak cukup lagi untuk memakan hama-hama tanaman yang selama ini menjadi makanannya.

Dampak dari penggunaan kedua bahan kimia tersebut diatas dalam kegiatan pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti selain telah mengakibatkan ketergantungan, juga telah mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Menurut beberapa informasi yang diperoleh bahwa kemungkinan besar air yang ada di Danau Diatas sudah tercemar berat dengan sisa-sisa pupuk dan peptisida. Hal ini terutama disebabkan kedua bahan jenis kimia tersebut ketika hujan kemungkinan besar terbawa oleh air masuk ke dalam danau. Apabila masalah pencemaran tersebut tidak ditanggulangi secara seksama kemungkinan akan akan mengganggu biota atau organisme yang ada didalam danau tersebut. Namun yang lebih penting lagi jangan sampai pencemaran tersebut membunuh ikan-ikan atau ikan yang dipelihara oleh penduduk di dalam keramba yang diletak di sekitar Danau Diatas. Jika hal ini sampai terjadi, maka akan mengancam matapencaharian penduduk.

Selain masalah perncemaran lingkungan, sektor pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti juga mengalami masalah yang tak kalah pentingnya yaitu masalah pemasaran. Dalam keadaan yang normal panen buah strawberi dapat diserap oleh pasar secara cepat, walaupun harus dipasarkan sampai ke kota Padang. Namun yang menjadi masalah adalah apabila terjadi puncak panen strawberi maka terlihat pasar yang di Kecamatan Lembah Gumanti tidak mampu menyerapnya. Hal ini mengingat jumlah buah-buahan yang dipanen setiap harinya bisa mencapai diatas 10 ton, sementara pasar yang hanya terbatas hanya di Propinsi Sumatera Barat saja. Para petani

ternyata tidak berani memasarkannya ke propinsi lain karena dikhawatirkan buah-buahan tersebut busuk di dalam perjalanan.



Dampak dari kelebihan panen tersebut telah mengakibatkan banyak buah strawberi yang terbuang karena tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Walaupun dijual dengan harga yang sangat murah, namun masyarakat setempat tidak membutuhkannya. Sampai saat ini tampaknya belum ada usaha dari pemerintah daerah membantu memecahkan persoalan over produksi dari buah strawberi tersebut. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Solok mengusahakan agar kelebihan produksi buah strawberi tersebut dapat dipasarkan ke daerah atau propinsi lain.

Atau pemerintah daerah bisa mengatasi permasalahan over produksi buah strawberi tersebut dengan memperkenalkan teknologi tepat guna yang bisa mengolah buah strawberi menjadi sele yang kemudian bisa dipasarkan oleh masyarakat. Dari beberapa pengamatan tampak bahwa kebanyakan petani strawberi sangat kebingungan apabila terjadi kelebihan produksi karena

mereka tidak mengerti cara mencari pasar yang lebih luas. Seyogyanya jika pemerintah daerah tidak bisa mencarikan pasar kiranya para petani strawberi dapat diperkenal dengan teknologi tepat guna yang sederhana yang bisa megolah buah strawberi tersebut. Ketika penelitian dilakukan hampir semua petani strawberi mengaku tidak mengerti cara membuat sele yang bahannya berasal dari buah strawberi tersebut.

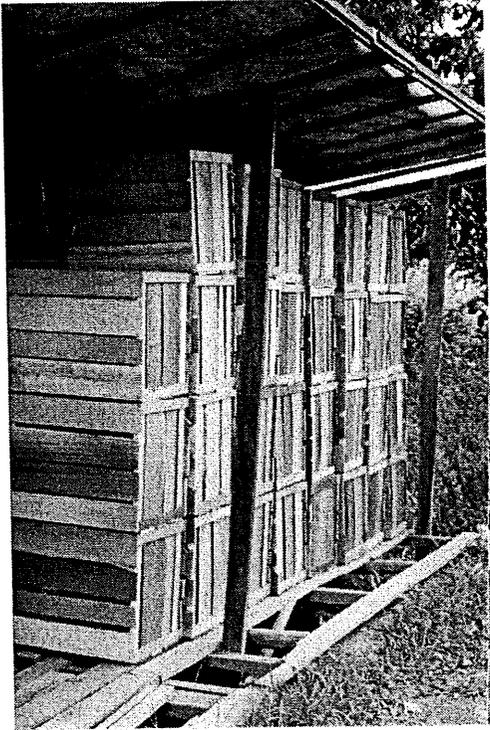
Padahal secara manual dan sederhana buah strawberi dapat diawetkan dengan metode pasteurs yaitu dengan cara memanaskannya hingga mendidih dan kemudian dimasukkan kedalam botol yang telah disterilkan sebelumnya. Sele strawberi tersebut tentunya dapat dengan mudah dipasarkan bagi tidak hanya bagi masyarakat lokal, melainkan juga kepada masyarakat yang ada di kota. Selain itu, buah strawberi yang sudah dijadikan sele dapat pula ditawarkan kepada wisatawan yang banyak datang ke Danau Diatas yang terletak di Kecamatan Lembah Gumanti.

Seharusnya teknologi tepat guna tersebut segera diperkenalkan agar masyarakat terbantu perekonomiannya, sehingga tidak ada lagi buah strawberi yang terbuang secara percuma. Teknologi tepat guna tersebut kiranya diharapkan dapat membuat sele yang berkualitas yang tahan lama minimal satu tahun. Dengan demikian sele strawberi yang dihasilkan dapat dipasarkan tidak hanya di Propinsi Sumatera Barat, melainkan juga di propinsi lainnya di Sumatera, bahkan ke pulau Jawa. Demikian pula dengan kelebihan dari produksi tomat kiranya dapat dipikirkan pemerintah daerah agar tomat tersebut dapat dijadikan menjadi saus yang kemudian dapat dikemas dalam botol atau plastik. Setelah mengalami proses pengolahan secara konprehensif tentunya saus tomat tersebut dapat dipasarkan kemana saja, terutama ke supermarket ataupun ke restoran-restoran.

Salah satu kegiatan yang terkait dengan kegiatan pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti adalah adanya kegiatan pembuatan kotak-kotak kayu yang merupakan kegiatan sampingan penduduk setempat. Kotak-kotak kayu tersebut terutama dijual oleh masyarakat kepada para petani dan telah menjadi tambahan pennghasilan tersendiri bagi masyarakat. Biasanya kotak kayu tersebut dijual sekitar Rp. 15 ribu per buah. Kotak-kotak kayu tersebut dipergunakan sebagai tempat tomat atau kol yang biasanya dipasarkan ke daerah lain di luar Kabupaten Solok.

Hanya saja kegiatan masyarakat membuat kotak-kotak kayu tersebut ternyata berdampak terhadap kelestarian hutan-hutan di Kecamatan Lembah Gumanti. Hal ini mengingat bahan-bahan kotak-kotak tersebut kebanyakan berasal dari kayu-kayu hasil dari kegiatan illegal logging. Seperti diketahui bahwa daerah sekitar Kecamatan Lembah Gumanti banyak ditumbuhi hutan-hutan

sekunder yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan rumah tangga. Jika kegiatan penebangan liar tersebut tidak segera dicegah dikhawatirkan juga berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan di daerah Hulu DAS Batang Hari (Kecamatan Lembah Gumanti dan sekitarnya).



7. Peti buah dan sayuran, yang menjadi persoalan adalah bahan baku yang menggunakan kayu-kayu dari hutan setempat.

Dalam upaya pemerintah daerah untuk mendukung intensifikasi kegiatan pertanian, pemerintah Kabupaten Solok dengan dana dari Kimpraswil Sumatera Barat telah membuat rencana membangun sub terminal agrobisnis (STA) di Alahan Panjang. Dengan hadirnya STA tersebut, diharapkan sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan Kecamatan Lembah Gumanti, Danau Kembar dan daerah sekitarnya bisa tertampung dan membantu petani mencari pelepasan produk ke pasaran. Diharapkan dengan berdirinya STA ini, akan timbul rasa aman dikalangan penduduk akan tetap tersedianya pasar bagi usaha pertanian mereka. Meskipun hingga saat ini distribusi hasil pertanian telah berjalan dengan baik, akan tetapi harga (pasar) merupakan sesuatu yang berada jauh dari jangkauan penduduk. Beberapa informan petani berharap, dengan beroperasinya STA ini mereka bisa mengetahui dengan pasti pergerakan harga komoditas yang mereka hasilkan.

Majunya kegiatan pertanian di Alahan Panjang, tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak sub-dinas pertanian Lembah Gumanti. Dengan fasilitas dari lembaga ini masyarakat telah membentuk kelompok-kelompok pertanian yang diharapkan akan memperkuat posisi mereka. Beberapa diantara kelompok tersebut adalah KUBA Kol Sungai Nanam Sepakat. Kelompok Usaha Bersama ini mengkhususkan diri mereka pada produksi dan distribusi kol. Produksi yang bisa mereka tampung hingga 18.000 ton/th yang kemudian didistribusikan antar Propinsi maupun ekspor ke Malaysia dan Singapura. Ikatan Petani Sayur Sehat (IPSS) di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Kelompok ini meski bersifat informal, akan tetapi mampu memberikan semacam wadah untuk bertukar pengalaman dikalangan anggotanya.

B. Sektor Perkebunan

Komoditi teh berasal dari perkebunan inti seluas 3.2001,80 hektar berlokasi di Kayu Aro Propinsi Jambi dan Danau Kembar Propinsi Sumatera Barat, serta 343,64 hektar perkebunan Plasma di Danau Kembar-Kab.Solok Sumatera Barat. Teh produksi PTPN VI terutama dari Kebun Kayu Aro telah lama diakui keunggulan kualitasnya sebagai salah satu yang terbaik di dunia, sehingga mampu berkompetisi dan menjadi primadona di sentra pasar teh. Hal ini tercermin dari realisasi penjualan dari tahun ke tahun. Inovasi dibidang teknologi dilakukan di tahun 1998 dengan menggunakan mesin petik teh untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Diversifikasi usaha di tahun 2000 melalui pengoperasian 2 unit mesin pengepakan teh kemasan Kajoe Aro, yang khusus didesain untuk retail market dan dipasarkan langsung melalui distributor, yang sebelumnya dijual dalam partai besar di dalam negeri maupun mancanegara .

Perkebunan teh di Danau Kembar, sejak tahun 1998 telah dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata dan banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Citra dan kualitas teh produksi PTPN VI yang beraroma khas, terutama teh "Kayu Aro" telah lama diakui keunggulan kualitasnya sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Komoditi ini mengalami peningkatan secara berarti dari tahun ke tahun dan cukup berperan dalam mendukung laju usaha perusahaan.

C. Sekor Perikanan dan Peternakan

Selain melakukan aktivitas di sektor pertanian banyak pula diantara penduduk di Kecamatan Lembah Gumanti yang berusaha di sektor perikanan dan peternakan. Daerah tersebut dikenal sebagai sumber penghasil ikan segar dan benih ikan tidak hanya di kabupaten Solok, melainkan juga di Propinsi Sumatera Barat. Kebanyakan ikan-kan tersebut dipelihara oleh penduduk di

sungai-sungai kecil maupun di dalam Danau Diatas. Cara penduduk memelihara ikan tersebut ternyata berbeda antara mereka yang berusaha di sungai-sungai kecil dengan di dalam danau.

Penduduk yang memelihara ikan di sungai-sungai kecil menggunakan peralatan yang sangat sederhana, seperti bubu ataupun keranjang yang bisa dijadikan sebagai tempat memelihara ikan. Sebaliknya masyarakat yang memelihara ikan di dalam danau lebih banyak menggunakan keramba. Keramba ikan merupakan fenomena yang banyak dijumpai hampir di setiap danau di Propinsi Sumatera Barat. Hanya saja banyak diantara keramba tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi kelestarian danau karena sering mengakibatkan terdegradasinya danau dengan adanya tumpukan sedimentasi karena banyak kotoran yang dihasilkannya. Kiranya masalah tersebut harus mendapat perhatian yang serius dari berbagai instansi terkait di Kabupaten Solok agar Danau Diatas yang menjadi sumber sebagian kehidupan penduduk tetap lestari.

Jenis ikan yang paling banyak dihasilkan dari Kecamatan Lembah Gumanti adalah ikan mas dan ikan nila. Ikan tersebut kebanyakan dipasarkan ke kota Padang dan daerah sekitarnya. Produksi ikan di daerah tersebut kiranya perlu dipelihara kesinambungannya agar pendapatan penduduk dan daerah dapat ditingkatkan. Berhubung pemeliharaan ikan tersebut tidak begitu rumit kiranya Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Solok dapat memberikan penyuluhan agar tiap-tiap rumah tangga di Kecamatan Lembah Gumanti dapat memelihara ikan dengan diberikan bibit ikan yang gratis. Pemeliharaan ikan tersebut dalam situasi perekonomian negara yang sulit sekarang ini kiranya dapat dijadikan sebagai *social security* apabila mereka menghadapi krisis pangan.

Selain sektor perikanan ternyata banyak diantara masyarakat di Kecamatan Lembah Gumanti yang berusaha di sektor peternakan. Peternakan paling banyak diusahakan penduduk adalah ayam buras. Peternakan lainnya yang ada di daerah tersebut adalah peternakan sapi. Ayam merupakan hewan ternak yang paling banyak diminati oleh penduduk di Kecamatan Lembah Gumanti karena selain pemeliharaannya yang relatif mudah, pemasarannya juga dianggap relatif lebih mudah oleh penduduk setempat. Selain itu, banyak juga diantara penduduk di daerah tersebut yang megusahakan ternak ayam petelur. Beberapa informasi diperoleh bahwa Kecamatan Lembah Gumanti termasuk salah satu daerah pemasok telur ayam di Kabupaten Solok.

Sementara itu penduduk Kecamatan Lembah Gumanti yang beternak Sapi ternyata jumlahnya sangat sedikit. Walaupun pemeliharaannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan memelihara ikan dan ayam, namun

dibutuhkan modal yang besar terutama untuk mendapatkan bibit sapi yang unggul. Masalah lainnya adalah penduduk juga sangat tergantung pada masalah pemasaran karena sapi-sapi tersebut tidak mungkin dipasarkan di Kecamatan Lembah Gumanti yang kecil. Berbeda dengan ayam tentunya dimana saja dapat dengan mudah disarkan oleh penduduk setempat.

D. Pertambangan

Kegiatan lainnya yang paling menonjol dilakukan oleh penduduk di Kecamatan Lembah Gumanti, khususnya di Nagari Alahan Panjang dan Air Dingin adalah pertambangan. Seperti yang telah diterangkan bahwa daerah tersebut merupakan hulu DAS Batang Hari. Ada empat perusahaan yang bergerak disektor pertambangan di hulu DAS Batang Hari yaitu PT. TBN. Muaro, PT. Mitra Bina Abadi, PT. Nusa Alam Abadi dan Tambang Emas Rakyat. Keempat jenis perusahaan telah membuka lahan sebanyak 1.600 Ha dengan jenis tambang yaitu batubara dan emas.

Selain itu, di daerah Hulu DAS Batang Hari juga ditemui berbagai jenis tambang terutama dari golongan galian C, seperti pasir kwarsa dan batu. Sebagian besar kegiatan pertambangan tersebut dilakukan penduduk setempat. Ada kecenderungan kegiatan pertambangan yang dilakukan penduduk tersebut sangat rawan konflik karena lokasi pertambangan sering terletak ditanah yang dimiliki oleh kelompok penduduk lainnya. Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Lembah Gumanti ada sekitar 10 Ha lahan pertambangan yang dilarang dieksploitasi oleh pemerintah daerah karena dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian di daerah Hulu DAS Batang Hari yang selanjutnya akan berdampak terhadap daerah hilirnya.

Kegiatan pertambangan lainnya yang banyak dilakukan penduduk di daerah tersebut adalah kegiatan pertambangan liar. Kegiatan pertambangan tersebut telah berlangsung lama dan bisa dijumpai di daerah yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk. Selain itu, kegiatan tersebut tampaknya tidak bisa dikontrol oleh aparat yang berwenang karena kemungkinan jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.

Jenis tambang yang paling banyak diambil penduduk di Kecamatan Lembah Gumanti adalah batu. Batu tersebut ternyata sangat mudah diambil karena disekitar lereng-lereng bukit atau gunung di Kecamatan Lembah Gumanti banyak mengandung batu. Batu merupakan sebuah komoditi ang sangat menguntungkan di daerah tersebut karena tidak dibutuhkan modal yang besar untuk mengambilnya. Jika seandainya penduduk tidak mempunyai alat angkut seperti truk tentunya mereka dapat menggunakannya dengan jalan menyewa.

Cara utama mereka mengambil batu tersebut dengan jalan menggali lereng-lereng bukit atau gunung yang mengandung batu. Setelah digali kemudian dibuatkan semacam saluran yang dibuat dari papan untuk kemudian dialirkan ke truk yang telah menunggu dibawah lereng bukit atau gunung. Kegiatan pertambangan liar dengan cara menggali lereng bukit dan gunung tersebut telah meninggalkan lobang-lobang besar di sekitar Kecamatan Lembah Gumanti. Kegiatan tersebut ternyata telah mengakibatkan tingginya tingkat erosi di lereng-lereng bukit atau gunung yang selanjutnya akan mengakibatkan mudahnya terjadi tanah longsor. Sebagai dari bahan erosi dan tanah longsor tersebut terseret masuk ke Danau Diatas melalui beberapa sungai kecil yang ada di sekitar Kecamatan Lembah Gumanti. Bahan-bahan longsor tersebut sudah barang tentu akan mengakibatkan percepatan sedimentasi di dalam danau yang lambat laun akan mempengaruhi ekosistem danau secara keseluruhan.

Dari beberapa informasi, diperoleh keterangan bahwa Kecamatan Lembah Gumanti mempunyai potensi tambang dari jenis bahan tambang tertentu, seperti pasir kwarsa. Ketika penelitian sedang berjalan beberapa perusahaan dalam negeri sedang melakukan kegiatan eksplorasi di daerah tersebut. Perusahaan tersebut ternyata merupakan perpanjangan tangan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri, seperti Negara Cina. Semua kegiatan eksplorasi tersebut ternyata dibiayai oleh negara asing yang mengharapkan jika berhasil, maka hasil tambangnya dijual ke negara yang bersangkutan. Hingga saat ini belum hasil tambang yang didapatkan yang potensinya dapat memenuhi pasar luar negeri. Jika suatu saat kegiatan pertambangan di Kecamatan Lembah Gumanti (Kecamatan Lembah Gumanti dan Air Dingin) berhasil menemukan potensi kwarsa dalam jumlah yang besar tentunya akan dapat menambah tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

E. Pariwisata

Kegiatan lainnya yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti adalah kegiatan pariwisata. Daerah tersebut mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena memiliki keunikan tersendiri dengan adanya Danau Diatas yang sering disebut juga sebagai danau kembar. Selain itu, iklim daerah tersebut khususnya Nagari Alahan Panjang dan Air Dingin merupakan daerah yang terdingin di Propinsi Sumatera Barat. Kondisi ini merupakan daya tarik bagi wisatawan-wisatawan yang ingin beristirahat dan menikmati alam di Kecamatan Lembah Gumanti.

Selain itu, bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan Danau Diatas bisa menyewa perahu yang disediakan penduduk setempat. Dari beberapa pengamatan dan wawancara menerangkan bahwa kebanyakan wisawan yang

berkunjung ke Kecamatan Lembah Gumanti adalah wisatawan lokal yang berasal dari daerah Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan wisatawan asing ternyata jumlahnya relatif sedikit. Wisatawan asing yang berkunjung ke daerah tersebut kebanyakan melakukan kegiatan jalan kaki mengelilingi kampung untuk melihat secara lebih dekat kenikmatan Kecamatan Lembah Gumanti. Waktu tinggal mereka rata-rata relatif pendek yaitu maksimal satu minggu berada di daerah tersebut.

Dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Lembah Gumanti, Pemda Kabupaten Solok telah menyediakan berbagai informasi tentang berbagai kegiatan yang ada di daerah tersebut, terutama untuk Danau Diatas. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan kalender kegiatan pariwisata di daerah tersebut. Kalender kegiatan tersebut kemudian dikemas dalam bentuk brosur, leaflet dan booklet. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Solok adalah membina seni budaya lokal yang khas Kecamatan Lembah Gumanti yang nantinya diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun dalam negeri.

A. Pengantar

Riuh rendah perpolitikan di level nasional membawa pengaruh terhadap berbagai persoalan ditingkat lokal. Kemajuan teknologi informasi, menyebabkan segala sesuatu yang terjadi di tingkat nasional dengan segera diketahui dan menjadi pembicaraan di tingkat daerah hingga ke warungwarung. Reformasi politik dan otonomi daerah membawa pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat di daerah, tidak terkecuali dalam pola pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang mereka miliki. Salah satu akibat penting reformasi politik nasional terhadap masyarakat di Sumatera Barat adalah munculnya gerakan kembali ke Nagari. Di Sumatera Barat gerakan ini kemudian menjadi kebijakan politik yang dijadikan sebagai perda dengan penetapan Nagari sebagai pengganti Desa. Banyak harapan yang ditumpukan pada proses ini, antara lain terkait dengan upaya pengelolaan SDA yang lebih baik. Pada bagian ini akan dibahas berbagai persoalan yang ada dalam kaitannya dengan pengelolaan SDA di Hulu DAS Batang Hari terutama pada di Kecamatan Lembah Gumanti. Persoalan-persoalan yang ada mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung dengan persoalan Otonomi Daerah. Pada bagian ini akan diuraikan juga berbagai hal yang dapat menjadi potensi bagi upaya pemeliharaan SDA.

B. Persoalan dalam Pengelolaan SDA di Hulu Batang Hari

Setidak-tidaknya terdapat beberapa persoalan yang menonjol terkait dengan pengelolaan SDA di hulu DAS Batang Hari. Persoalan tersebut antara lain persoalan dibidang kehutanan, tambang serta pertanian. Semua persoalan diatas punya kaitan dengan persoalan otonomi daerah.

Persoalan yang menonjol dalam pengelolaan SDA ketika era reformasi bergulir adalah meningkatnya laju kerusakan hutan¹. Hal yang sama juga terjadi di Sumatera Barat, pada tahun 1999 misalnya, luas hutan yang ada mencapai 2.600.286 akan tetapi jumlah tersebut telah mengalami penurunan

¹ Laju kerusakan hutan di Indonesia setelah era reformasi bergulir (setelah tahun 1997) diperkirakan mencapai 2 juta hektar pertahun. Berbagai kebijakan pasca otonomi daerah, seperti penyerahan sebagian urusan dibidang kehutanan kepada pemda Tk. II misalnya telah melahirkan kebijakan HPH 100 Ha di Kalimantan Timur, yang dianggap sebagai biang keladi meningkatnya kerusakan hutan.

hingga menjadi 2.557.706 pada tahun 2001 (Haluan, 2/11/2001). Dari hampir 1,8 juta hektar tiap tahun kerusakan hutan Indonesia, Sumbar menyumbang kerusakan sampai 20 persen. Data dari Warsi tahun 2002 misalnya mengemukakan kondisi tutupan lahan di dalam DAS Batang Hari yang terbaru (berdasarkan citra landsat TM7 tahun 2002) jika dilihat dari segi luas kabupaten-kabupaten yang terkait di dalamnya, hanya tinggal 32,683.74 km² atau 26 persen dari total luas keseluruhan 10 kabupaten terkait (63.732.00 km²). Kerusakan DAS tersebut sejak tahun 1932 hingga saat ini rata-rata 125 hektare per tahun. Bila kondisi demikian terus berlangsung, diperkirakan hutan DAS Batang Hari yang saat ini masih 1,5 juta hektare akan tinggal 46.967 hektare (10 persen) pada tahun 2011 (Suara Pembaharuan, 11/3/2003). Pada kasus Sumatera Barat, persoalan ini terkait dengan maraknya kegiatan illegal logging serta beroperasinya sawmill liar. Illegal logging yang terjadi dibanyak tempat di Sumatera Barat (termasuk Kabupaten Solok) melibatkan penduduk setempat. Hal ini dikatakan sebagai eksek dari cukup tingginya tingkat pengangguran². Proses pelibatan penduduk lokal dalam kegiatan ini kurang lebih sama dengan apa yang terjadi dibanyak tempat di Kalimantan. Cukong-cukong pemilik modal memberikan modal kerja kepada para penduduk untuk melakukan penebangan kayu yang kemudian ditampung oleh mereka. Terlibatnya penduduk setempat membuat kegiatan ini berjalan dengan cukup lancar (Haluan, 22/8/2001). Kegiatan illegal logging bukan hanya dilakukan terhadap hutan-hutan produksi, maupun alam tetapi juga kawasan hutan lindung seperti Taman Nasional Kerinci Seblat/TNKS (Haluan, 19/10/2001; 3&5/11/2001). Seperti yang telah diketahui sebagian kawasan TNKS masuk ke dalam wilayah Kabupaten Solok



8. Hutan gundul yang mudah ditemui di daerah Alahan Panjang dan Solok.

² Salah seorang informan dari bagian Ekonomi Pemda Kabupaten Solok menyatakan, meski persoalan pertambahan jumlah penduduk bukan hal yang penting di Solok (karena adanya kebiasaan merantau di kalangan orang Minang) akan tetapi sedikitnya jumlah angkatan kerja yang terserap oleh kesempatan kerja yang ada menyebabkan mereka masuk ke dalam kegiatan illegal logging.

Persoalan krusial lain terkait dengan sektor kehutanan di Solok dan Alahan Panjang adalah rawannya kebakaran hutan. Pada bulan April tahun 2000 misalnya sekitar 125 hektar hutan negara yang ada di Lembah Gumanti kembali terbakar. Terbakarnya hutan ini diduga diakibatkan oleh kegiatan perladangan yang dilakukan oleh penduduk (Haluan 8/4/200). Kegiatan perladangan dengan pembukaan lahan dengan cara dibakar hingga saat ini masih dipraktekkan oleh sebagian anggota masyarakat.

Selain itu, seperti telah disebutkan pada bab 3 di atas, kegiatan pendukung dibidang pertanian juga memberikan kontribusi secara tidak langsung terhadap persoalan kerusakan hutan. Produksi pertanian dari Kabupaten Solok umumnya serta Kecamatan Lembah Gumanti sebagian besar dikirim keluar daerah. Untuk pengiriman tersebut diperlukan kotak-kotak kayu untuk pengepakan. Meski belum ada data pasti tentang ini, akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan jumlah kayu yang diperlukan untuk kegiatan ini cukup besar. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah darimana asal kayu tersebut?

Sektor pertambangan dan pertanian/perkebunan juga memberikan kontribusi terhadap persoalan pengelolaan Sumber Daya. Persoalan ini misalnya terkait dengan upaya-upaya ekstensifikasi lahan pertanian terutama perluasan kebun sawit. Berdasarkan informasi dari Dinas Nakertrans Propinsi Sumatera Barat³, perluasan lahan semacam ini terkait dengan kegiatan transmigrasi. Transmigrasi di Sumatera Barat pada umumnya diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit. Di Kabupaten Solok misalnya sejak tahun 1985 hingga tahun 1992 telah dibuka empat lokasi transmigrasi dengan 1.644 KK atau 7.194 jiwa yang terlibat didalamnya. Sayangnya data dari Dinas tersebut tidak menunjukkan jumlah lahan yang telah dibuka. Akan tetapi dengan memperhatikan jumlah KK yang terlibat didalamnya dapat dipastikan jumlah lahan yang dikonversi cukup besar.

Perkembangan luasan perkebunan kelapa sawit juga erat kaitannya dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit dibeberapa tempat. Pemerintah kabupaten Solok misalnya pada tahun 2003 telah memberikan ijin usaha perkebunan kelapa sawit seluas 119.217 hektar pada kawasan DAS Batang Hari. Informasi lebih jauh tentang hal ini telah diuraikan di bab 4.

Persoalan lain yang penting terkait dengan pengelolaan SDA terutama di Kecamatan Lembah Gumanti adalah tingginya penggunaan pestisida⁴. Sebagai gambaran tentang persoalan ini dapat dikemukakan apa yang didapatkan dari hasil pengamatan dan wawancara di Alahan Panjang.

³Wawancara dengan salah seorang staf Dinas Nakertrans Sumatera Barat di Padang.

⁴Penjelasan tentang hal ini lihat juga bab 3.

Beberapa petani menjelaskan bahwa meskipun tanah di daerah mereka tergolong subur, akan tetapi setelah beberapa kali musim tanam, tingkat kesuburan lahan umumnya akan sangat turun sehingga diperlukan pupuk dan pestisida dalam jumlah yang banyak. Akibat tingginya harga pupuk, beberapa petani kemudian mengalihkan jenis tanaman yang mereka usahakan dengan jenis-jenis tanaman yang tidak terlalu banyak menggunakan pupuk.

Usaha penanaman markisa oleh penduduk juga memberikan kontribusi terhadap kerusakan hutan, terutama dengan penggunaan kayu sebagai penopang markisa. Dengan jumlah petani yang mengusahakan markisa di Kabupaten Solok, jumlah kayu yang dipergunakan untuk usaha ini menjadi sangat signifikan. Selain itu penambangan galian golongan C dilembah kecamatan Gumanti dan Air Dingin seluas 10 ha juga menjadi persoalan tersendiri. Selain itu, posisi kabupaten Solok dan terutama Lembah Gumanti sebagai sentra penghasil sayuran dan buah-buahan di Sumatera barat juga memunculkan kebutuhan akan kayu untuk pengemasan.

C. Otonomi Daerah Dan Potensi Pengelolaan SDA

Otonomi daerah adalah tantangan sekaligus peluang. Jika dibagian awal diperlihatkan sebagai permasalahan yang timbul sebagai akibat langsung maupun tidak langsung penerapan kebijakan otonomi daerah, pada bagian ini akan dikemukakan potensi yang bisa dikembangkan darinya.

Kabupaten Solok adalah salah satu kabupaten yang dianggap paling berhasil mengimplementasikan konsep otonomi daerah. Hal ini misalnya tercermin dari program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD⁵) di 22 kabupaten di Indonesia yang dilakukan oleh Bapenas (Bapenas, 2004). Kabupaten Solok termasuk salah satu dari 3 kabupaten di Sumatera Barat⁶ yang dipercayakan untuk ikut serta di dalamnya. Terdapat beberapa inisiatif reformasi yang dianggap cukup menonjol di Kabupaten Solok yaitu: i) pengawasan pembangunan, selain dilakukan Bawasda sebagai institusi resmi, juga dilakukan oleh LPE (yang sekarang berganti nama menjadi LPPII); ii) pemda telah melimpahkan sebanyak 105 wewenang kepada pemerintah nagari⁷ (setingkat desa) untuk mengatur rumah tangganya; iii) untuk mengoptimalkan kinerja, Bupati telah menerbitkan Standar Kinerja Individu (SKI) bagi PNS yang menduduki jabatan struktural; iv) pemda mulai

⁵P2TPD merupakan program yang bertujuan membantu Kabupaten yang mempunyai komitmen tinggi terhadap reformasi untuk meningkatkan kualitas tata pemerintahannya."

⁶Dua kabupaten lain adalah Kabupaten Tanah Datar dan Pesisir Selatan

⁷Kabupaten Solok melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2001 telah mengatur Nagari sebagai satuan administratif terendah (sebagai pengganti desa) yang mengacu pada Perda Propinsi Sumbar Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

melakukan peningkatan pelayanan masyarakat melalui pelayanan Satu Pintu Plus (lihat Haluan, Padang Express, Mimbar Minang 31/12/2001).

Diantara berbagai kebijakan penting tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintahan Nagari serta SK Bupati Nomor 33 tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Kabupaten SOlok dan Nagari dianggap sebagai kebijakan penting. Tampaknya upaya melimpahkan 105 kewenangan Bupati kepada Wali Nagari, dianggap sebagai terobosan terpenting yang pernah dilakukan. Terdapat 19 bidang kegiatan yang sebagian wewenang pengelolaannya diserahkan pada Nagari. Diantara berbagai bidang (serta wewenang) yang dilimpahkan yang terkait dengan pengelolaan SDA adalah sebagai berikut:

- a. Bidang kehutanan:
 - pengawasan pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat nagari
 - pengawasan terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi
 - pemberia rekomendasi izin pengelolaan hutan yang ada dalam Nagari kepada koperasi dengan luas maksiman 20 Ha.
- b. Bidang perindustrian
 - Pengawasan pencemaran limbah industri
- c. Bidang pariwisata
 - pengelolaan objek wisata dalam Nagari diluar Rencana Induk Pariwisata daerah
- d. Bidang pertambangan dan lingkungan hidup
 - pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C dibawah 1 Ha tanpa memakai alat berat
 - rekomendasi izin pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
 - rekomendasi izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat dan atau diatas 1 Ha
 - rekomendasi izin dan pengawasan pengelolaan bahan galian golongan A dan B
- e. Bidang pertanahan
 - penetapan batas nagari yang disahkan oleh Bupati
 - penetapan batas tanah ulayat Nagari
- f. Bidang pertanian
- g. Bidang perkebunan

Pelimpahan wewenang ini disatu sisi mencerminkan proses demokratisasi yang sejalan dengan konsep Nagari (baik sebagai satuan pemerintahan

terkecil yang otonom maupun konsep Nagari dalam perspektif lokal). Akan tetapi disisi lain pertanyaan yang penting dan mendasar adalah sejauh mana pelimpahan wewenang tersebut akan membawa dampak negatif, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Tulisan ini selanjutnya akan membahas persoalan wewenang Wali Nagari di Alahan Panjang serta perannya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, terutama mengingat pentingnya posisi daerah ini sebagai hulu sungai Batang Hari.

Dalam Bidang Lingkungan Hidup, otonomi daerah berarti:

1. Menyesuaikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan ekosistem setempat.
2. Menghormati kearifan tradisional yang sudah dikembangkan masyarakat didalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari.
3. Tidak berdasarkan batas administratif, tetapi berdasarkan batas ekologi (bioecoregion).
4. Meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan setempat dan bukan menghancurkan daya dukung ekosistem dengan eksploitasi yang melewati daya dukung.
5. Pelibatan secara aktif masyarakat adat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan (menentukan) dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Walhi, tt).

Mengacu pada konsep diatas, melalui otonomi daerah diharapkan adanya penyesuaian antara program pembangunan dengan ekosistem setempat serta diterapkannya model-model pengelolaan yang didasarkan pada kearifan lokal. Akan tetapi apa yang dijumpai dilapangan belumlah mencerminkan hal-hal yang semacam itu. Apa yang dikehendaki pada tataran ideal belum bisa sepenuhnya dilaksanakan pada tataran praktis. Nagari Alahan Panjang misalnya, pada prakteknya saat ini lebih mencerminkan ciri-ciri desa pada masa orde baru⁸. Nagari lebih banyak merepresentasikan kegiatan-kegiatan administratif desa seperti pengurusan surat ijin, pembuatan KPT dan lain-lain⁹. Kegiatan-kegiatan yang lebih diarahkan pada pelibatan warga secara keseluruhan sesuai dengan konsep Nagari belum mampu dilaksanakan. Prinsip otonom serta demokratis¹⁰ pelaksanaan administrasi Nagari justru diterapkan secara keliru. Masyarakat menempatkan diri sebagai pihak yang paling berhak atas setiap sumber daya yang ada. Akibatnya persoalan illegal

⁸ Yang ditetapkan lewat UU No. 5 Tahun 1979 dan kemudian diganti oleh UU No. 22 Tahun 1999.

⁹ Mochtar Naim, melihat persoalan ini sebagai akibat dari pemberlakuan UU 5/79 selama hampir satu generasi, sehingga mereka yang saat ini berada dalam lingkaran kekuasaan Nagari adalah orang-orang yang gagap dan tidak sepenuhnya memahami konsep Nagari. Kalaupun ada kalangan tua yang mengisi posisi Wali nagari serta institusi dibawah Nagari lainnya, akan tetapi mereka inipun telah terbiasa dengan kehidupan sentralistis ala Orde Baru (Naim dalam Yandri 2003).

¹⁰ Penjelasan lebih detail mengenai prinsip ini lihat Afrizal, 2004.

logging yang kian marak (seperti telah dikemukakan dibagian muka) seolah-olah merupakan hak rakyat dan jauh dari jangkauan aparat hukum. Jika pelaku illegal logging adalah masyarakat setempat, maka persoalan hukum menjadi seakan-akan tidak relevan dipersoalkan.

Diantara berbagai wewenang yang dilimpahkan kepada Nagari, sebagian diantaranya adalah urusan yang terkait dengan pengelolaan SDA. Contohnya adalah sebagian urusan dibidang kehutanan, pertanian dan transmigrasi. Akan tetapi yang lebih menonjol pelaksanaannya dilapangan adalah persoalan pembagian penghasilan dari berbagai urusan tersebut.

D. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA

Kearifan lokal yang seringkali dikemukakan oleh para informan di Alahan Panjang ketika berbicara masalah pengelolaan SDA hampir selalu mengacu pada pernyataan *Alam takambang menjadi guru* atau *Adat basandi syarak, syarak basandi agama*. Agaknya falsafah umum masyarakat Minang inilah yang hendak dijadikan sebagai filosofi umum dalam pengelolaan SDA. Akan tetapi bagaimana penerapannya dalam tataran praktis saat ini selalu menjadi masalah. Para informan tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang cukup memuaskan terhadap persoalan ini. Kebanyakan yang mereka ajukan adalah petatah-petitih lama yang terkait dengan pengelolaan alam. Akan tetapi bagaimana petatah-petitih tersebut operasional tidak ada penjelasan yang memuaskan. Akan tetapi beberapa hasil studi yang dilakukan oleh Warsi (2003) maupun Shahrawati (2002) agaknya bisa dijadikan sebagai dasar penjelasan akan falsafah tersebut. Berikut ini akan disajikan beberapa contoh kearifan lokal yang pernah hidup dalam masyarakat.

KASUS 1 "BAARALEK KAPALO BANDA"

Kebijakan-kebijakan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam telah banyak dikenal oleh masyarakat Minang. Pada masyarakat Alahan Panjang misalnya dikenal sistem penangkapan ikan di sungai hanya pada waktu-waktu tertentu. Berdasarkan namanya Alahan berarti tempat menangkap ikan dan Panjang merujuk pada panjang Alahan tersebut yang mencapai 1 kilometer. Tempat menangkap ikan (Alahan) tersebut berupa percabangan sungai yang panjangnya mencapai 1 kilometer dan bertemu kembali diujung lainnya. Dalam satu tahun, penangkapan ikan (pemanfaatan) hanya boleh dilakukan selama dua kali. Pertama pada hari Raya Idul Fitri dan kedua pada hari Raya Idul Adha. Pada kedua kesempatan tersebut masyarakat membendung salah satu dari percabangan sungai pada hari pertama dan cabang yang pada hari kedua. Penduduk kemudian secara bersama-sama mengambil ikan dari sungai yang telah dikeringkan tersebut. Acara ini dinamakan sebagai baaralek kapalo banda. Dari paparan tersebut jelas sekali apa yang hendak dituju oleh kebiasaan semacam ini yaitu terjaganya kelestarian sumber daya alam (ikan). Ikan diberikan kesempatan berkembang biak dan hanya diambil pada waktu dan lokasi tertentu. Kearifan semacam ini makin lama semakin dilupakan.

KASUS 2
PENGLOLAAN DANAU MANINJAU

Bentuk pengelolaan Danau Maninjau ini bisa diawali dengan bentuk pengelolaan parak di daerah Koto Malintang, Kanagarian Duo Koto. Di Koto Malintang diterapkan pengaturan penampang melintang daerah yang sedemikian rupa. Dimana bagian hulunya dibiarkan menjadi kawasan lindung (HSAW Maninjau Utara – Selatan), di bawahnya disangga oleh kawasan parak dan di bagian tengah dijadikan kawasan pemukiman serta budidaya, sementara bagian hilir dijadikan daerah pengembangan pertanian seperti persawahan, jala apung, kolam ikan, dan seterusnya merembak pada pengembangan Danau Maninjau (Siaran pers WARS: 21-04-2003).

Kasus 3
PENGLOLAAN HUTAN DI KOTO MALINTANG

Sementara hutan lindung kawasan Koto Malintang sendiri tak diganggu-gugat. Disamping untuk keuntungan perekonomian masyarakat, keberadaan parak juga untuk kontrol sosial atau kedekatan hubungan antar masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya aturan atau sanksi-sanksi yang ditetapkan jika masyarakat melanggar pengambilan kayu di hutan lindung dan parak.

Salah satunya dituturkan Ali Umar Sutan Jamaris, tokoh adat Koto Malintang, dengan adanya aturan jika ada pemilik duren yang memanjat atau mengambil buah duren sebelum masa panennya, maka tumbuhan duren yang diambil tersebut diikat dengan tambang atau digelang hingga dibiarkan mati. Pengambilan buah duren yang belum pada masanya itu dianggap hanya demi kepuasan pemilik sendiri, yang mana harusnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat Koto Malintang, bahkan yang tak punya kebun duren.

Selain itu ditetapkan aturan kalau seluruh masyarakat Koto Malintang dibolehkan mengambil buah duren yang telah jatuh di kebun siapapun di Koto Malintang, namun hanya dalam batas waktu dari pukul 04.00-06.00 Wib subuh saja. Dengan aturan itu berarti semua masyarakat Koto Malintang bisa menikmati hasil kebun siapa pun juga.

Namun aturan adat Koto Malintang ini sangatlah berbeda dengan desa tetangganya, Koto Gadang yang juga termasuk wilayah Kanagarian Duo Koto. Contohnya dalam acara pengangkatan penghulu (pemimpin satu suku), masyarakat Desa Koto Malintang memperingatinya dengan harus memotong seekor sapi sedangkan masyarakat Desa Koto Gadang cukup dengan makan bersama saja.

Begitu juga dalam tradisi lainnya serta aturan adat terhadap parak dan hutan yang dilindungi. Wali Nagari Koto Gadang, Drs. M. Idrus Datuak Angek Nan Kuniang, menjelaskan kalau ada kawasan hutan yang berada pada kemiringan 45 derajat di wilayah itu yang tak boleh diambil masyarakat. Sedangkan kayu yang berada di dalam parak boleh saja ditebangi tapi harus pohon usia tua serta dengan izin mamak. Sehingga kedua nagari ini merasa perlu dimekarkan atau dipisah. Tapi pada dasarnya adat yang berbeda tersebut tujuannya sama demi melindungi hutan dan mengelola parak.

Sementara itu hasil studi Syahrawati, menunjukkan adanya berbagai kearifan lokal dalam masyarakat Nagari terkait dengan pengelolaan SDA. Kearifan ini dalam pandangannya terkait dengan falsafah *alam takambang menjadi guru*, serta sumber-sumber agama (Islam) serta sisa-sisa kepercayaan-kepercayaan berbau mistik peninggalan agama Hindu. Salah satu contoh penting kearifan lokal adalah pembagian kawasan hutan menjadi dua

kategori yaitu (1) *hutan rimbo hanaa* dan (2) *hutan rimbo piatu*. Yang termasuk kedalam kategori pertama adalah hutan larangan atau hutan cadangan sedangkan kategori kedua adalah hutan dengan pemanfaatan terbatas. Implikasi logis dari konsep ini adalah tidak boleh dimanfaatkannya salah satu bagian dari hutan yang berarti terjaganya kondisi hutan. Konsep hutan larangan, lubuk larangan pada dasarnya adalah suatu cara masyarakat lokal untuk menetapkan satu kawasan sebagai kawasan konservasi. Agaknya konsep Lubuk larangan ini dekat dengan contoh kasus pertama. Meski sebetulnya pada lubuk larangan, masyarakat dilarang sama sekali untuk memanfaatkan ikan yang berada di lubuk tersebut.

E. Prakarsa Penting Dalam Pengelolaan SDA

Pada bagian akhir tulisan ini akan diangkat beberapa prakarsa penting yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan dalam rangka pengelolaan SDA. Bagian ini juga akan menyoroti efektifitas dan hambatan yang mengikuti prakarsa tersebut.

a. Konsultasi Publik Pengelolaan DAS Batang Hari

Konsultasi Publik tentang Pengelolaan SDA DAS Batang Hari dengan Pendekatan Bioregion atau Berbasiskan Masyarakat di Kabupaten Bungo (Jambi), Solok, Sawahlunto/Sijunjung (februari 2003).

Acara Konsultasi Publik yang bertujuan merangkum kesepahaman bersama ini telah lebih dahulu diadakan di Kabupaten Solok tanggal 18 Januari 2003. Rumusan yang didapat dalam pertemuan yang juga dihadiri unsur pemkab, tokoh masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi ini, antara lain perlunya rencana aksi atau aktifitas kongkrit dari masyarakat di setiap nagari-nagari yang berada di sekitar DAS Batang Hari. Selanjutnya adanya fasilitasi khusus untuk anak nagari dalam menyusun Rencana Umum Tata Ruang Nagari (RUTRN), peruntukan (zonasi) dan penetapan hasilnya dalam bentuk legal draft yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Nagari (Perna) yang didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok.

Hal yang juga menjadi rumusan dalam pertemuan itu yaitu harus adanya forum nagari-nagari sepanjang DAS Batang Hari untuk membangun kesepahaman/sinergi produktif antar seluruh potensi anak nagari. Forum dapat dibuat antar nagari dalam satu kabupaten, antar kabupaten atau antar propinsi, yang bisa diistilahkan dengan forum multipihak masyarakat sepanjang DAS Batang Hari. Secara simultan forum dikembangkan menjadi forum multi-pihak dengan seluruh stakeholder yang dikordinasikan oleh bupati di tingkat Kabupaten dan gubernur di tingkat propinsi atau pejabat setingkat menteri di tingkat regional/ nasional.

Selain itu Konsultasi Publik di Solok juga melahirkan kesepakatan melegitimasi keberadaan hutan larangan, lubuk larangan atau kawasan konservasi lainnya yang selama ini sudah eksis, tumbuh dan berkembang di masyarakat nagari-nagari. Perlu dikembangkan juga solusi yang saling menguntungkan semua pihak (win-win solution) untuk mengatasi dampak lingkungan hidup terhadap nagari-nagari, (misal: dukungan teknologi pengolahan limbah galian C di Air Dingin agar tata air sub-DAS Batang Hari lestari, atau mengganti tiang junjungan sehingga mengurangi pengambilan kayu untuk kebutuhan kebun markisa. Kemudian upaya mengalihkan perhatian masyarakat dari kayu, termasuk mengajak Dinas Pendidikan untuk memasukan penyelamatan DAS dalam kurikulum, dan yang pasti penegakan hukum untuk kerusakan hutan ini harus dikongkritkan dalam bentuk aplikasi nyata oleh pihak terkait)

Rekomendasi dari acara Konsultasi Publik di Sawahluntu/Sijunjung, salah satunya yaitu perlu adanya gerakan terpadu langkah pembangunan antara daerah hulu dan hilir Batang Hari yang berkeadilan, diikuti dengan mengakui hak-hak adat masyarakat untuk terjaminnya kesejahteraan masyarakat (Warsi, 2003). Konsultasi publik ini menjadi penting dalam upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih besar kepada publik tentang keterkaitan persoalan hulu dan hilir DAS Batang Hari. Tingginya laju kerusakan hutan di wilayah DAS menjadi keprihatinan bersama karena dapat mengakibatkan mubazirnya berbagai proyek berdana besar yang telah disiapkan. Diantara proyek tersebut adalah Batang Hari Irrigation Project (BHIP) melalui proyek irigasi Sungai Dareh Sitiung (SEDAS). Persoalan lain yang mengemuka adalah pendekatan bioregion dalam pengelolaan DAS. Secara administratif DAS Batang Hari meliputi wilayah propinsi Sumatera Barat dan Jambi. Ada 6 sub DAS yang terdapat di kedua propinsi tersebut, yaitu sub DAS Batang Hari hulu, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Sangir, dan Batang Merangin-Tembesi. Sebagian besar sub DAS terdapat di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Pendekatan bioregion dianggap efektif bagi upaya perbaikan pengelolaan DAS Batang Hari. Substansi pendekatan ini adalah pengelolaan wilayah tanah dan air cakupannya seharusnya tidak ditentukan oleh batas administrasi/politik, tetapi oleh batas geografis komunitas manusia dan sistem ekologisnya.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan konsultasi publik tersebut diadakan sebuah workshop regional pengelolaan SDA DAS Batang Hari. Tema yang diangkat dalam workshop ini adalah Membangun Kesepahaman Bersama Menuju Pengelolaan SDA oleh Masyarakat dengan Pendekatan Bioregion pada DAS Batang Hari. Poin penting yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah perlunya dibangun kesepahaman bersama dalam pengelolaan DAS serta pentingnya peran serta dan keterlibatan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar DAS Batang Hari.

b. Nota Kesepahaman Bersama Para Pihak Tentang Pengelolaan SDA pada DAS Batang Hari

Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Nabeli Makarim, dan Menteri Kehutanan RI, M Prakosa, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan RI, Wahjudi Wardoyo menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Para Pihak Tentang Pengelolaan SDA pada DAS Batang Hari yang mengalir di dua provinsi (Sumbar-Jambi) tersebut. Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Sumbar, Fachri Achmad yang diwakili oleh Ketua Bappedalda Sumbar, Darman Siri, Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, Bupati Sawahlunto Sijunjung, H. Darius Apan, Wakil Bupati Solok, Elfi Sahlan Ben, dan Wakil Bupati Bungo, H. Abdul Malik HM juga menandatangani nota kesepahaman tersebut. Poin penting dalam nota kesepahaman tersebut adalah penggunaan pendekatan bioregion dalam melihat persoalan DAS. Akan tetapi disadari juga adanya beberapa hambatan untuk melaksanakan konsep bioregion, antara lain kebijakan pemerintah di bidang konservasi SDA yang tidak konsisten terutama dalam bidang penggunaan lahan misalnya konsistensi dalam rencana tata ruangnya. Selain itu terkait dengan era desentralisasi turut menjadi kendala dimana masing-masing kabupaten dan kota memiliki kebijakan yang kerap berbeda terhadap SDA yang berada di wilayahnya. Seperti kebijakan terhadap pemanfaatan lahan di satu wilayah DAS. Selain itu juga disepakati pembentukan Forum Multi Pihak Masyarakat Kawasan DAS Batang Hari yang dikoordinasikan oleh bupati, gubernur, menteri kehutanan, dan menteri negara lingkungan hidup. Kemudian juga disepakati menggalang pencarian dana bersama untuk mendukung program pelesatarian kawasan DAS Batang Hari (melalui APBD, APBN, dana luar negeri, dan dana lain yang tidak mengikat). Peluang mekanisme perdagangan karbon (carbon trade), penggantian hutang untuk alam (debt for nature swap), serta clean development mechanism(CDM), harus dapat dimanfaatkan untuk upaya ini

A. Pendahuluan

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (2002), luas DAS Batang Hari adalah 817.800 ha. Sedangkan berdasarkan keterangan dari Departemen Kehutanan, Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan (2003), sekitar 406.100 ha (49,7%) diantaranya merupakan DAS Batang Hari hulu.¹¹ Selebihnya, sekitar 411.700 ha (50,3%) merupakan bagian tengah dan hilir. Dari luasan DAS Batang Hari hulu yang sudah terdata itu, sekitar 347.592 ha (85,6%) berada di Propinsi Sumatera Barat, selebihnya sekitar 58.508 ha (14,4%) berada di Propinsi Jambi. Di Propinsi Sumatera Barat, luasan DAS Batang Hari hulu ini terbagi di dua kabupaten yakni Kabupaten Solok dan Sawahlunto Sijunjung. Luasan DAS Batang Hari hulu di Kabupaten Solok adalah 195.372 ha (56,2%) dan di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung adalah 152.220 ha (43,8%).

Berdasarkan jenis dan luas penutupan lahannya, DAS Batang Hari hulu di Kabupaten Solok didominasi oleh hutan lebat 51.715 ha (26,5%), kebun campuran 37.086 ha (19%), dan perkebunan 34.866 ha (17,8%). Selebihnya merupakan hutan jarang, tegalan, ladang, permukiman, dan rawa. Sedangkan penyebaran peruntukan lahan berdasarkan RUTR/RTRW DAS Batang Hari hulu adalah sekitar 81.401 ha (41,7%) di dalam kawasan hutan dan 113.970 ha (58,3%) di luar kawasan hutan. Penyebaran peruntukan lahan di dalam kawasan hutan berupa hutan lindung, hutan produksi dan cagar alam. Sedangkan penyebaran peruntukan lahan diluar kawasan hutan tidak ditampilkan pada data. Perkiraan penyebaran peruntukan lahan-lahan di luar kawasan hutan ini berupa kebun campuran, perkebunan, tegalan, ladang, permukiman, dan rawa.

Apabila dicermati, penggunaan lahan tegalan di luar kawasan hutan ini sekitar 14.559 ha (7,5%); sedangkan penggunaan ladang sekitar 1.685 ha (0,8%). Pihak Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan juga menyajikan data jumlah dan penyebaran peladang berpindah. Jumlah dan penyebaran peladang berpindah di dalam kawasan hutan adalah 231 KK dengan luas 330 ha. Sedangkan jumlah dan penyebaran peladang berpindah di luar kawasan hutan adalah 349 KK dengan luas 445 ha. Jumlah dan penyebaran

¹¹ Identifikasi terhadap sub DAS Sangir dan Jujuhan dari lima sub DAS di DAS Batang Hari hulu

ini kemungkinan lebih kecil dari jumlah sebenarnya karena ladang-ladang bekas rotasi yang tidak terhitung. Disamping itu, Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantam juga menampilkan data penduduk berdasarkan mata pencaharian di DAS Batang Hari hulu. Pada data yang ditampilkan ditunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang bermukim di luar kawasan hutan bermata pencaharian sebagai petani yakni sekitar 72.869 jiwa. Namun demikian data ini kurang lengkap karena tidak didukung dengan data lain berupa jumlah dan penyebaran lahan pertaniannya. Padahal data ataupun informasi mengenai hal ini penting untuk mengkaji jumlah, intensitas dan penyebaran lahan pertanian di DAS Batang Hari hulu.

Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan mencoba menguraikan pengelolaan atau lebih tepatnya pemanfaatan sumber-sumber daya DAS Batang Hari hulu. Uraian akan lebih ditekankan pada sumber-sumber daya DAS Batang Hari hulu yang ada di luar kawasan hutan, seperti pemanfaatan pertanian. Penekanan pada kegiatan pertanian menjadi penting pada kajian ini karena lokasi penelitian di Kecamatan Lembah Gumanti merupakan sentra kegiatan pertanian penduduk, bahkan terbesar di Kabupaten Solok. Kegiatan ini juga penting untuk dikaji, selain tentunya kegiatan-kegiatan besar seperti pengusahaan hutan dalam bentuk HPH, perkebunan swasta, pertambangan, dan perindustrian. Kegiatan pertanian di DAS Batang Hari hulu tampak menonjol di luar kawasan hutan di lahan-lahan sekitar permukiman penduduk yang telah sejak lama dikuasai oleh mereka. Tekanan demi tekanan terhadap sumber-sumber daya yang ada di DAS Batang Hari hulu selama bertahun-tahun diakibatkan oleh permintaan pasar hasil-hasil pertanian yang tinggi dari daerah ini.

B. Pengelolaan DAS Batang Hari Hulu

Data yang ditampilkan Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantam diatas agak berbeda dengan data yang ditampilkan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Sumatera Barat yang membagi DAS Batang Hari hulu menjadi lima sub DAS yakni, sub DAS Jujuhan (52.089,44 ha), sub DAS Batang Gumanti (49.030,23 ha), sub DAS Batang Hari (43.866,59 ha), sub DAS Sangir (40.002,02 ha), dan sub DAS Pangean (8.679,26 ha). Demikian pula dengan pembagian wilayah administratifnya, Badan ini membagi DAS Batang Hari hulu di Sumatera Barat ke dalam lima kecamatan yakni, Kecamatan Lembah Gumanti, Sangir, Pulau Punjung, Sitiung, dan Koto Baru. Sedangkan Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantam baru membaginya dalam dua sub DAS yakni sub DAS Sangir dan Jujuhan. Demikian pula dengan pembagian wilayah administratifnya. Hal ini tampaknya masalah administratif belaka, dimana proses identifikasi terhadap sub-sub DAS di

DAS Batang Hari hulu oleh Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan belum selesai seluruhnya.

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada di DAS Batang Hari hulu yang ada di luar kawasan hutan, yakni pertanian dan hubungannya dengan tekanan permintaan pasar, terdapat sajian data menarik yang perlu dicermati. Data yang disajikan Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah Sumatera Barat (2002) memperlihatkan bahwa di kawasan DAS Batang Hari hulu (Kabupaten Solok dan Sawahlunto Sijunjung) terdapat kegiatan-kegiatan besar baik yang berada di dalam maupun diluar kawasan hutan yang mendorong laju kerusakan lingkungan DAS Batang Hari hulu. Kegiatan-kegiatan besar itu antara lain di bidang kehutanan, perkebunan, perindustrian, dan pertambangan. (tabel)

Tabel 7. Kegiatan-kegiatan Besar di Kawasan Hulu DAS Batang Hari Tahun 2003

No	Instansi	Kegiatan	Tujuan	Keterangan
1	Kehutanan	HPH PT Bukit Raya Mudisa	Produksi kayu	28.000 ha
		HPH PT Andalas Lestari Permai		40.000 ha
		HPH PT Inhutani IV		48.000 ha
		HPH PT Andalas Merapi Timber		28.840 ha
2	Perkebunan	PT. Tidar sungkai Sawit	Produksi sawit dan teh	10.000 ha
		PT. Bina Pratama Sakato Jaya		24.000 ha
		PT. Sumatera Jaya Agro Lestari		8.500 ha
		PT. Tidar kerinci Agung		20.000 ha
		PT. Nusantara Indah Api-api		14.000 ha
		PT. Sumbar Andalas Kencana		7000 ha
		PT. Salago Makmur Plantation		9000 ha
		PT. Incasi Raya		7000 ha
		PT. Mitra Kerinci		2025 ha
		PT. Pecconina Baru		1048 ha
3	Perindustrian	PKS PT Tidar Kerinci Agung	Produksi curd palm oil	
		PKS PT Tidar Sungkai Sawit		
		PKS PT. Sumbar Andalas Kencana		
		PKS PT Selago Makmur Plantation		
		PKS PT Incasi Raya		
		Pabrik Tapioka PT Incasi Raya		
4	Pertambangan	PT TBN Muaro	Tambang Batubara	300 ha
		PT. Mitra Bina Abadi	Batubara	300 ha
		PT. Nusa Alam Abadi	Batubara	1000 ha
		Tambang Emas Rakyat	Emas	

Sumber: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Sumatera Barat, 2002

Kegiatan-kegiatan besar di DAS Batang Hari hulu ini disinyalir oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Sumatera Barat menyebabkan kerusakan lingkungan DAS Batang Hari hulu. Kerusakan yang terjadi itu antara lain degradasi tanah seperti peningkatan laju erosi, peningkatan

sedimentasi, dan gangguan hidrologi seperti penurunan kualitas tanah dalam menyerap, meloloskan dan menyimpan air, penurunan kualitas air tanah, fluktuasi debit air sungai yang cukup besar antara musim penghujan dan kemarau, ketimpangan ketersediaan air permukaan dan terganggunya kontinuitas debit sungai sepanjang waktu. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Sumatera Barat juga mengidentifikasi lima penyebab kerusakan tanah itu antara lain, 1) pembukaan wilayah hutan untuk dijadikan areal perkebunan atau pertanian, 2) perubahan fungsi dari hutan menjadi areal budidaya (pertanian dan permukiman), 3) penguasaan areal pertanian dan perkebunan tanpa kaedah konservasi tanah dan air, 4) pembabatan wilayah hutan tanpa adanya upaya penghutanan kembali, dan 5) pembangunan sarana dan prasarana di wilayah DAS itu.

Disamping itu, berdasarkan interpretasi citra *land sat*, Badan ini juga mensinyalir adanya perubahan peruntukan lahan di dalam kawasan hutan di daerah hulu antara lain menjadi, 1) perkebunan kelapa sawit, 2) perubahan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri, dan 3) adanya perubahan peruntukan lahan dari lahan budidaya menjadi areal pertambangan batubara. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan peruntukan lahan ini antara lain semakin luasnya lahan kritis, terjadinya perubahan iklim lokal, terganggunya tata air, terjadinya migrasi satwa liar yang dilindungi karena perusakan habitatnya, dan berkurangnya fungsi daerah hulu DAS Batang Hari sebagai daerah penyimpanan air tanah. Dampak ikutan dari perubahan peruntukan lahan ini antara lain terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau di DAS Batang Hari.

Dari data diatas terlihat bahwa pemanfaatan sumber-sumber daya DAS Batang Hari hulu di dalam dan diluar kawasan hutan mempunyai karakteristik yang berbeda. Pemanfaatan sumber-sumber daya DAS Batang Hari di dalam kawasan hutan berupa kegiatan-kegiatan besar seperti pengusaha hutan dalam bentuk HPH dan perubahan peruntukan lahan menjadi perkebunan swasta. Sedangkan pemanfaatan diluar kawasan hutan didominasi oleh kegiatan pertanian. Kedua jenis pemanfaatan di dalam dan di luar kawasan hutan itu masing-masing juga mempunyai kontribusi terhadap kerusakan lingkungan di DAS Batang Hari hulu. Namun demikian, sebagaimana yang disajikan pada data diatas, keduanya mempunyai akibat-akibat kerusakan yang cenderung berbeda. Jenis-jenis kerusakan lingkungan karena sebab-sebab pemanfaatan sumber daya DAS Batang Hari hulu di luar kawasan hutan menyangkut persoalan daya dukung lahan dan air di daerah hulu tersebut, terutama di daerah pertanian. Sementara itu jenis-jenis kerusakan lingkungan karena sebab-sebab pemanfaatan sumber daya DAS Batang Hari hulu di dalam kawasan hutan cenderung menampilkan persoalan yang lebih kompleks termasuk diantaranya perubahan iklim lokal dan keanekaragaman hayati.

Apabila dicermati lebih jauh dari luas DAS Batang Hari seluas 817.800 ha itu, jumlah luas lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan jauh lebih besar daripada yang ada di dalam kawasan hutan. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 3.597 ha, sedangkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan mencapai 16.440 ha. Walaupun data ini menunjukkan kecenderungan umum di seluruh DAS Batang Hari, namun kecenderungan serupa juga terjadi di DAS Batang Hari hulu, seperti di Kecamatan Lembah Gumanti. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber-sumber daya DAS Batang Hari di luar kawasan hutan jauh lebih leluasa, baik dari segi intensitas maupun perluasannya. Disamping itu, keadaan ini juga menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah setempat terhadap DAS Batang Hari hulu di dalam kawasan hutan saja tidak cukup menjelaskan kerusakan lingkungan yang terjadi di DAS Batang Hari. Hal ini mengingatkan pemanfaatan sumber-sumber daya DAS Batanghari hulu di luar kawasan hutan jauh lebih leluasa tanpa adanya kontrol seperti pengamanan yang ketat dari pihak pemerintah daerah setempat. Sebaliknya, perhatian dan kontrol yang lebih ketat dilakukan di dalam kawasan hutan, sementara itu masyarakat diluar kawasan hutan tanpa adanya kontrol seperti pengamanan itu terus-menerus melakukan eksploitasi sumber-sumber daya DAS Batang Hari hulu yang semakin dikuasanya. Kecenderungan seperti ini bukan dimaksudkan untuk menuduh warga masyarakat di DAS Batang Hari hulu, khususnya di Kecamatan Lembah Gumanti sebagai pelaku kerusakan lingkungan, namun lebih merupakan pembelaan terhadap ketidakmampuan mereka mengendalikan tekanan demi tekanan yang diciptakan oleh permintaan pasar.

C. Penduduk dan Lahan

Jumlah penduduk Kecamatan Lembah Gumanti yang cukup besar, bahkan terbesar di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten solok, yakni sekitar 44.543 jiwa, memiliki tingkat kepadatan yang relatif tinggi 70 jiwa/km . Demikian pula dengan tingkat kepadatan agrarisnya juga tergolong tinggi yakni sekitar 0,89. Pertambahan penduduk terus terjadi dengan konsekwensi semakin tergantung pada lahan-lahan pertanian. Hal ini tentunya akan semakin meningkatkan beban di daerah DAS Batang Hari hulu. Pola permukiman penduduk kini terbentuk secara mengelompok di perkampungan-perkampungan di daerah dataran yang agak landai. Rumah-rumah penduduk sudah semakin berhimpitan menandakan terbatasnya lahan untuk permukiman penduduk. Satu rumah-tangga biasanya menguasai kurang dari 200 m untuk hunian rumahnya dan biasanya dihuni sampai 4-5 jiwa. Kebutuhan lahan-lahan untuk permukiman penduduk semakin terasa terbatas dan diantaranya sudah mulai menggunakan lahan-lahan pertanian yang agak jauh dari pusat perkampungan sebagai areal perumahan yang baru.

Dengan kecenderungan seperti itu, lahan-lahan di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti memiliki kecenderungan penguasaan lahan yang tinggi. Hampir tidak ada tanah kosong "tak bertuan", semua lahan jika bukan menjadi areal permukiman telah dijadikan lahan-lahan pertanian. Dari sejengkal lahan di sisi rumah sampai hamparan lahan-lahan di lereng perbukitan, yang beberapa diantaranya memiliki tingkat kelerengan miring yang semestinya bisa untuk daerah lindung, telah dikuasai oleh penduduk. Indrizal (1994), dalam laporannya menyebutkan bahwa aktivitas pertanian di sekitar DAS Batang Hari hulu, termasuk yang disebutkan adalah di dalam dan sekitar Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) terus diperluas hingga awal abad ke 20. Kecenderungan ini juga terjadi di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti dimana penduduk sudah mengenal sistem pertanian secara intensif sejak tahun 1974, ketika itu pemerintah daerah Sumatera Barat bekerja sama dengan pemerintah Jerman menyelenggarakan program *Agriculture Development Program* (ADP) di wilayah kecamatan ini.

Laporan indrizal juga mengindikasikan adanya perkembangan tradisi perladangan berpindah yang dilakukan oleh penduduk di sekitar TNKS itu menjadi pertanian intensif, atau keduanya dilakukan secara bergantian dengan menyesuaikan kondisi lingkungan setempat. Di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, lahan-lahan disekitar permukiman penduduk sudah tidak ada lagi yang "menganggur". Semua telah diusahakan seperti untuk tanaman kol, tomat, bawang merah, cabe merah, dan kentang. Sejengkal lahan sangat berarti bagi penduduk setempat karena bisa memberikan kemanfaatan hasil pertanian yang memadai. Pemanfaatan ini dilakukan hingga ke lerang-lereng bukit, kecuali di lereng-lereng yang terjal dan tinggi. Di areal seperti itu, penduduk masih mempunyai ketrampilan membuka ladang, sehingga hampir areal di daerah perbukitan sebenarnya juga telah dimanfaatkan oleh penduduk setempat termasuk untuk perladangan. Sebuah puncak bukit misalnya, dilihat dari kejauhan tinggal ujung puncaknya saja yang menyisakan beberapa tegakan pohon, selebihnya terlihat gundul.

Gambaran penguasaan lahan ini memang tidak seperti yang dibayangkan orang mengenai indahnya Danau Diatas di DAS Batang Hari hulu, dan mungkin tidak terdapat di laporan-laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, kondisi DAS Batang Hari hulu terutama di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti dalam keadaan gundul. Bentuk wilayah Kecamatan Lembah Gumanti yang bergelombang memungkinkan melihat dengan jelas panorama bukit-bukit yang gundul itu. Hampir semua lahan termasuk topografi lahan-lahan yang umumnya miring telah dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk bercocok tanam berbagai jenis tanaman pertanian yang cocok untuk daerah dataran tinggi. Dengan curah hujan tahunan sekitar 3.271 mm dan bulan basah (>100 mm) 10 bulan,

Lembah Gumanti bersuhu udara rata-rata 17,4^o C. Kondisi alam ini sangat kondusif untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan seperti kol, tomat, cabe merah, bawang merah, dan kentang serta buah-buahan seperti strawberi, markisa, dan alpukat. Wilayah ini telah sejak lama dikenal sebagai sentra sayur-sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Solok, bahkan salah satu di Sumatera.

Lahan menjadi sedemikian berharga di DAS Batang Hari hulu ini. Lahan pula yang menjadi alat produksi utama penduduk. Sedemikian berharganya, lahan-lahan di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti kini telah menjadi barang investasi. Banyak diantara petani sendiri yang berkembang menjadi investor lokal, tetapi banyak pula diantara penguasa lahan-lahan itu datang dari luar daerah atau putra daerah yang telah lama merantau dan menanamkan investasinya pada lahan-lahan pertanian di daerah ini. Bagi sejumlah investor, penguasaan lahan yang dilakukannya tidaklah kecil. Umumnya para investor menguasai lebih dari 1 ha lahan pertanian. Komersialisasi lahan pertanian ini telah dimulai sejak produk-produk pertanian ini berhubungan dengan permintaan pasar dan daerah ini sebagai penawarnya. Sejak saat itu para investor tertarik untuk menguasai lahan-lahan pertanian penduduk untuk dijadikan komoditi pasaran yang lebih luas, yakni skala nasional. Penduduk sekitar sendiri kini hanya menguasai lahan-lahan yang sempit dan untuk menambah penghasilan mereka bekerja pada lahan-lahan yang telah dikuasai para investor itu.

Penguasaan lahan-lahan oleh penduduk setempat yang semakin sempit ini menggambarkan bahwa pada kenyataannya banyak juga diantara penduduk setempat yang miskin yang semakin menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber daya di DAS Batang Hari hulu. Tekanan demi tekanan karena kebutuhan hidup penduduk yang semakin meningkat berlangsung bertahun-tahun di DAS Batang Hari hulu. Kondisi seperti ini diperbesar oleh faktor penguasaan lahan oleh para investor yang jelas-jelas berorientasi pada kepentingan pasar. Permintaan pasar dari berbagai penjuru daerah di Indonesia dibebebankan pada DAS Batang Hari hulu. Hal inilah yang tidak disadari oleh pemerintah daerah setempat, bahwa tekanan permintaan pasar terhadap produk-produk hasil pertanian di DAS Batang Hari hulu khususnya di Kecamatan Lembah Gumanti telah menjadi tekanan tersendiri yang menyebabkan kerusakan lingkungan DAS itu. Faktor ini pula yang pada uraian diatas disebutkan sebagai faktor yang tidak terkontrol dan bahkan sejauh ini pemerintah daerah tidak mampu mengontrolnya.

Kini walaupun penduduk sudah semakin kesulitan membuka lahan-lahan pertanian baru, karena penguasaan yang dominatif itu, ternyata masih dimungkinkan membuka lahan-lahan di puncak bukit tetapi tentunya dengan

ongkos produksi yang jauh lebih mahal. Walaupun cara ini tidak banyak diminati penduduk setempat, tetapi bagi sebagian petani-petani yang sudah dihimpit kemiskinan di daerah ini, peluang itu bisa menjadikannya hidup lebih panjang. Cara yang digunakan untuk membuka lahan di puncak bukit itu adalah tebas bakar. Semak-semak di puncak bukit yang sudah gundul sejak lama itu di tebas lalu di bakar. Teknik ini menguntungkan karena abu bakar yang mengandung karbon bekas bakar itu bermanfaat sebagai pupuk alamiah bagi kesuburan lahan. Apabila dicermati, sistem tebas bakar yang dilakukan di puncak bukit tidak dilakukan dengan cara mengindahkan batas rembetan api. Lahan yang di bakar dibiarkan terbakar dengan sendirinya sehingga memungkinkan lahan-lahan disekitarnya turut terbakar pula.

D. Tekanan Pasar

Seorang petani muda bercerita, bakul (pedagang besar) di pasar induk Kramatjati, Jakarta selalu menghubungi bakul-bakul lokal untuk memesan jenis-jenis sayuran apa yang diinginkan (pasar). Melalui bakul-bakul lokal itu informasi pasar itu kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk permintaan kepada petani, tentunya dengan sedikit daya tawar, dan jadilah transaksi jual-beli sayur-sayuran. Petani hanya tahu harga dari bakul-bakul lokal dan dia bebas memilih kepada bakul siapa hasil pertaniannya akan dijual. Demikian pula si bakul akan selalu aktif mencari sayur-sayuran dari berbagai kalangan petani. Dari beberapa petani, bakul-bakul itu kemudian mengumpulkan hasil pembelian sayur-sayuran di suatu tempat, biasanya di rumahnya. Di beberapa tempat, bakul seperti ini biasa disebut sebagai pedagang pengumpul. Beberapa bakul mempunyai armada angkutan sendiri yang biasanya berupa truk, tetapi ada pula bakul yang menyewa armada lain. Dengan armada truk itu para bakul kemudian mendistribusikan sayur-sayuran itu ke berbagai tempat. Pasaran utama mereka adalah pasar induk Kramatjati dan Waringin Bandung, tetapi ada juga yang dipasarkan ke kota-kota di Sumatera seperti Medan, Riau, Palembang, Jambi, dan tentunya Padang.

Permintaan hasil-hasil pertanian berupa sayur-sayuran dari wilayah Kecamatan Lembah Gumanti ini terjadi setiap hari. Setiap hari pula puluhan truk keluar dari daerah ini mengangkut hasil-hasil bumi berupa sayur-sayuran itu. Di berbagai daerah di pasar yang dituju, hasil-hasil pertanian ini kemudian diperdagangkan. Umumnya, truk-truk ini menuju pasar sejenis pasar induk dimana fungsi pasar ini adalah menjual kepada bakul secara grosir, tidak secara eceran. Bakul-bakul kota yang kemudian mendistribusikan lagi barang-barang dagangan berupa sayur-sayuran itu ke pasar-pasar yang lebih kecil yang ada di setiap kota, seperti pasar-pasar di kota kabupaten dan kecamatan. Dari pasar ini sebagian konsumen rumah tangga membeli

langsung tetapi umumnya masih ada pedagang lain seperti pedagang kecil di setiap kampung dan keliling yang menjual sayur-sayuran ini ke setiap rumah tangga di kampung-kampung dan permukiman penduduk. Tentunya konsumen rumah tangga sudah membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga awal yang diberikan petani. Dalam hal ini bakul, mulai dari bakul besar sampai bakul kecil berperan penting dalam menaikkan harga-harga sayur-sayuran itu.

Konsumsi rumah tangga terutama di daerah perkotaan seperti di Jakarta dan Bandung itu sudah sangat tergantung dari suplai hasil-hasil pertanian dari daerah-daerah pedesaan, seperti dari wilayah Kecamatan Lembah Gumanti ini. Warga masyarakat kota umumnya sudah bercirikan bukan petani, seperti pegawai yang bekerja di kantor-kantor seperti kantor pemerintah dan perusahaan swasta dan pedagang atau pekerja informal lainnya. Konsumsi rumah tangga mereka, sejauh masih mengkonsumsi sayur-sayuran itu, sangat tergantung dari produksi pertanian di pedesaan. Di kota, mereka menghasilkan uang secara nominal yang akan berfungsi untuk dibelanjakan barang-barang diantaranya barang-barang hasil pertanian seperti sayur-sayuran itu. Se jauh ini, ketergantungan masyarakat kota terhadap hasil-hasil pertanian seperti sayur-sayuran itu masih terus berlangsung. Hal ini sangat ditentukan oleh gaya hidup mereka seperti pola gizi yang secara berulang dan terus-menerus direproduksi oleh industri media ke dalam gagasan-gagasan masyarakat kota. Bahwa sayur-sayuran merupakan jenis makanan yang bergizi tinggi dan baik untuk kesehatan dilakukan agar tingkat konsumsi mereka terhadap jenis makanan ini tetap tinggi. Siklus pasar, akan memfungsikan berbagai jenis pupuk kimia dan obat-obatan sejenis pestisida yang diproduksi oleh berbagai industri pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Demikian secara terus menerus, siklus ini berputar untuk menjaga konsumsi warga masyarakat kota dan produksi masyarakat desa.

Terlihat bahwa pasar sedemikian rumit dan masyarakat kotapun sedemikian kompleksnya. Jauh dari bayangan hidup warga nagari yang hidup secara sederhana di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti itu. Namun, kesederhanaan hidup warga masyarakat nagari ini ternyata terkait dengan kompleksitas itu. Warga masyarakat nagari menjadi produsen dan masyarakat kota menjadi konsumen serta bakul dan kalangan industri sebagai perantaranya. Bakul dan kalangan industri ini yang dalam pandangan sosiolog Ankie Hoogvelt (1985), sebagai kapitalis komprador (perantara) yang mengambil untung dari "perampasan" hasil-hasil pertanian di pedesaan dan konsumen-konsumen rumah tangga di perkotaan. Industri pertanian telah menggerakkan hubungan produsen dan konsumen ini dengan reproduksi gagasan-gagasan "politik pangan" seperti pertahanan gizi melalui industri-industri media. Dalam hal ini media telah diterima secara massal dan mampu

mengubah strategi pemasaran menjadi tontotan yang menarik. Masyarakat yang dalam hal ini disebut sebagai kalangan pemirsa itu disuguhi berbagai tontonan menarik termasuk dalam bentuk iklan yang menggelitik yang secara perlahan namun tidak disadari akan menjadi bagian dari hidup mereka.

Kini, sejak industri media semakin meraja, bukan hanya masyarakat kota tetapi masyarakat desapun telah mengkonsumsi hal-hal yang juga dikonsumsi masyarakat kota. Reproduksi gagasan seperti menjaga kesuburan tanah dan anti hama misalnya, telah diterima sejak lama oleh kalangan masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk menjaga produktivitas pertanian mereka. Kembali kepada bakul, industri-industri pertanian kini telah mengirim sepasukan *marketing sales* ke pelosok-pelosok nagari bahkan ke setiap individu petani untuk menawarkan segala merk pupuk dan pestisida. Semuanya tidak lain untuk menjaga agar produktivitas pertanian mereka tetap tinggi. Di wilayah Kecamatan lembah Gumanti, *marketing sales* ini mempunyai kantor-kantor cabang dan toko-toko pemasarannya. Petani dengan sangat mudah membeli pupuk dan pestisida di nagarinya. Kini, para petani sudah sangat tergantung dengan pupuk dan pestisida. Tanpa pupuk dan pestisida tanaman mereka akan mati atau setidaknya tidak tumbuh subur. Jika bukan diserang hama maka tanaman mereka akan berpenyakit. Seorang petani menyebut pestisida itu sebagai "racun tanaman", artinya racun yang mematikan berbagai jenis hama dan penyakit.

Tabel 8. Jenis Pupuk dan Pestisida yang Digunakan Petani di Wilayah Kecamatan Lembah Gumanti

Pupuk	Pestisida	Istilah Lokal
Pupuk Kimia - KCL - TSP - ZA - Urea - NPK - SS	Insektisida - Proklem - Delvin - Metador	"Racun ulat"
Pupuk kandang	Fungisida - Diktan M45 - Manzeta	"Racun ulat"
	PPC (Pupuk Pelengkap Cair) - CPN - Baifolan - NHS - Genrasil	"Racun daun"
	Perekat dan perata	Campuran pestisida

Sumber: Interview, 2004

Dalam laporan studinya di DAS Batang Hari hulu terutama di desa-desa di dalam dan sekitar TNKS, Endrizal (1994) menyebutkan bahwa, sejak jaman

kolonial petani telah menjadi objek. Petani amat tergantung pada tekanan-tekanan pasar. Petani memang memproduksi, tetapi mereka hanya menikmati bagian terkecil dari 'kebijaksanaan' yang berlaku. Apabila mencermati uraian diatas, maka akan tergambar bahwa petani memang produsen yang dirugikan. Kerugian petani ini bukan hanya pada selisih tingkat harga di pasaran yang dimainkan oleh bakul-bakul besar dan kecil namun juga kerugian pada kondisi lingkungannya. Uraian diatas secara jelas menggambarkan bagaimana petani terpaksa harus mengeksploitasi secara terus-menerus, bahkan petani tidak bisa menghentikan eksploitasi-eksploitasi pada lahan ini. Pupuk dan pestisida adalah salah satu indikator pertanian intensif. Tetapi bukan hanya itu, perluasan lahan-lahan pertanian karena semakin sempitnya lahan oleh penguasaan para investor menyebabkan petani semakin merambah ke puncak bukit. Pertanian semi intensifpun diterapkan di puncak-puncak bukit. Bukit-bukit yang merupakan daerah tangkapan air itupun bukan hanya menjadi gundul tetapi terus-menerus dieksploitasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bukan lagi untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat kota, tetapi kini untuk mempertahankan hidup mereka.

E. Strategi Adaptasi

Sistem pertanian intensif yang telah dikenal sejak tahun 1974 pada kenyataannya tidak mengangkat seluruh harkat hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti. Mereka yang hidup dalam kubang kemiskinan masih cukup dominan. Kondisi seperti ini hampir merata di setiap nagari. Memang benar, masyarakat di nagari Alahan Panjang relatif lebih menonjol secara fisik, baik terlihat dari bangunan rumah maupun sarana lainnya. Namun apabila kita mencermati uraian diatas, struktur penguasaan lahan-lahan mereka semakin sempit akibat dikuasai para investor. Di nagari-nagari lain seperti Air Dingin, kondisi kemiskinan masyarakat semakin nyata terlihat. Permukiman penduduk di kampung-kampung nagari terlihat kumuh, rumah berdesak-desakan, bangunan-bangunan yang terlihat renta, anak-anak kecil yang terlihat kotor, dan tidak terkesan adanya kehidupan perekonomian yang semarak di nagari ini mengindikasikan secara fisik bahwa nagari jauh tertinggal dari nagari-nagari lainnya. Benar saja, sebagian besar penduduk di nagari Air Dingin tinggal di lereng-lereng bukit. Mereka umumnya tidak menguasai lahan-lahan pertanian yang relatif landai seperti di Alahan panjang. Mereka telah memanfaatkan puncak-puncak bukit untuk tanaman markisa. Pemanfaatan lahan di puncak bukit ini bahkan telah memasuki areal TNKS.

Demikian pula di nagari Salimpat, dimana penduduk telah membuka lahan-lahan di puncak bukit untuk perladangan dan pertanian semi intensif. Sebagian

besar penduduk Salimpat memang menguasai lahan, namun lahan-lahan yang mereka kuasai relatif sempit. Nagari ini dikenal sebagai penghasil strawberi. Di lahan-lahan yang relatif lebih landai dan datar mereka menanam starwberi, sedangkan untuk jenis tanaman lain mereka membuka lahan-lahan di puncak-puncak bukit. Sebagaimana di nagari air Dingin, penduduk di nagari Salimpat juga terkesan hidup miskin. Rumah-rumah mereka berhimpitan dan terbuat dari tembok-tembok yang telah rapuh. Jalan-jalan yang emnghubungkan dari rumah ke rumah yang lain hanyalah jalan-jalan kecil mirip seperti gang-gang di perkotaan dan umumnya masih merupakan jalan tanah. Di samping rumah, biasanya terdapat kandang ternak seperti sapi dan kambing. Sejauh ini strawberi belum mampu mengangkat harkat hidup mereka ke kondisi perekonomian yang lebih baik.

Di Alahan Panjang, dan sepertinya juga terjadi di nagari-nagari lain di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, seorang petani tidak akan menanam satu jenis tanaman di lahan pertaniannya. Ia akan menanam beberapa jenis dalam selang waktu panen, seperti misalnya di petak satu ditanam kol, petak dua ditanam bawang merah, petak tiga tanam tomat, petak empat tanam cabe merah, dan seterusnya. Pembagian jenis-jenis tanaman di setiap petak ini dimaksudkan untuk menghindari mengantisipasi harga jenis yang jatuh. Misalnya ketika harga kol di pasaran jatuh dan harga kol di kalangan petani juga ikut jatuh, maka pada waktu yang akan datang mereka masih mempunyai panen bawang merah atau cabe merah atau kentang dan lainnya. Demikian pula sebaliknya untuk jenis tanaman lain, upaya ini merupakan strategi adaptasi mereka terhadap harga-harga di pasaran. Petani sadar, ia bukanlah orang yang menentukan harga pasar maka upaya yang dilakukannya berupa siasat produksi karena dalam pandangan mereka tidak mungkin dalam suatu waktu yang sama seluruh jenis hasil pertanian akan jatuh harganya secara bersamaan. Dalam pandangan mereka, jika satu jenis hasil eprtanian jatuh, maka jenis hasil pertanian yang lain akan stabil atau tinggi.

Tingkat harga pasar terhadap barang-barang hasil pertanian ini sangat mungkin mengalami naik turun karena kekuarangan atau kelebihan barang. Hal ini terjadi karena pasraan hasil-hasil pertanian terpusat di pasar induk, seperti pasar induk Kramatjati di Jakarta. Sedangkan produksi hasil-hasil pertanian berasal dari berbagai tempat, seperti misalnya kol tidak hanya berasal dari Lembah Gumanti tetapi juga dari Lembang, Puncak, Bukittinggi, Kerinci dan sebagainya. Demikian pula untuk produksi bawang merah misalnya, bukan hanya dari lembah Gumanti tetapi juga dari daerah Brebes, Jawa tengah dan Nganjuk, Jawa Timur. Apabila di setiap daerah menanam jenis komoditi yang sama dan semuanya dipasarkan ke satu pasar yakni pasar induk maka sesuai hukum pasar harga akan jatuh. Untuk menghindari

hal ini, informasi mengenai jenis-jenis produksi hasil pertanian di setiap daerah menjadi sangat penting.

Seorang petani di Lembah Gumanti menjelaskan, ia akan selalu bertanya kepada *marketing sales* pupuk dan pestisida tentang jenis-jenis produksi pertanian di suatu daerah. *Marketing sales* biasanya mempunyai informasi yang cukup akurat karena ia berkeliling ke setiap daerah-daerah pertanian baik di Sumatera maupun Jawa. Berdasarkan informasi dari *marketing sales* ini, petani itu mengatur jenis-jenis tanaman di setiap petak lahannya yang sudah dibagi dalam ukuran-ukuran yang lebih kecil dengan jenis-jenis tanaman yang berbeda-beda. Jika di suatu daerah banyak menanam kol misalnya, si petani itu akan mengurangi jumlah tanaman kolnya agar rugi karena dalam perkiraannya harganya mungkin akan jatuh. Demikian pula untuk jenis tanaman yang lainnya. Si petani akan mengantisipasi jenis tanaman tertentu untuk tidak ditanam dan memilih jenis tanaman yang lain yang mungkin tidak ditanam petani-petani lain di daerah lain sehingga kemungkinan juga harga panennannya akan lebih baik. Walaupun serba tidak pasti, namun ini merupakan strategi adaptasi petani untuk mempertahankan harga produksi pertanian mereka dan sekaligus juga merupakan strategi untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga mereka.

Sebagaimana disebutkan di muka, dan disebutkan juga di dalam laporan Endrizal (1994), bahwa petani dikendalikan oleh sistem pasar. Strategi adaptasi yang dikembangkan di kalangan petani lembah Gumanti ini adalah pilihan jenis komoditi. Jika pilihannya tepat maka ia akan sedikit diuntungkan dengan situasi pasar yakni harga panennannya tidak jatuh. Tetapi jika pilihannya meleset, maka jelas ia akan sangat rugi karena besarnya biaya produksi yang tidak tertutupi oleh hasil panen. Strategi adaptasi tidak selalu menguntungkan petani. Dengan menyiapkan strategi adaptasi pun, petani masih dalam keadaan serba tidak pasti. Tidak ada jaminan bahwa hasil panennannya akan dibeli bakul dengan harga yang tinggi. Petani tidak mempunyai posisi tawar untuk menentukan harga-harga produksi pertanian mereka. Pada situasi seperti ini, nasib petani tidak jauh seperti yang digambarkan Scott (1989), hidupnya seperti terendam dalam air sampai batas leher, sedikit saja terkena ombak mereka akan tenggelam. Selama ini memang belum terbukti ombak itu menggulung mereka, namun akibat eksploitasi lingkungan yang berlebihan di DAS Batang Hari hulu ini tidak menutup kemungkinan bencana alam seperti tanah longsor, banjir ataupun kekeringan akan menjadikan mereka bangkrut.

Kecamatan Lembah Gumanti (dengan beberapa Nagari didalamnya seperti Alahan Panjang, Air Dingin, Nagari Salimpat dan lain-lain) dikenal sebagai wilayah hulu sungai Batanghari. Dari sinilah sebagian dari air sungai Batang Hari yang mengalir sepanjang propinsi Sumatera Barat hingga ke propinsi Jambi berasal. Berbagai inisiatif telah dilakukan dalam upaya untuk mengelola sungai yang termasuk dalam kategori rusak berat ini, yang melibatkan tidak hanya pemerintah kedua propinsi tetapi juga kalangan LSM. Diantaranya yang paling menonjol adalah upaya Warsi dalam membangun pemahaman bioregion dalam melihat persoalan sungai Batang Hari. Konsep yang bagus ini ternyata lebih banyak beroperasi pada tataran konsep dan wacana pada tingkat elit (propinsi maupun kabupaten). Kondisi aktual di hulu menunjukkan bahwa persoalan ataupun kenyataan sehari-hari tetap berjalan sebagaimana adanya. Tidak tampak tanda-tanda bahwa konsep bioregion tersebut dipahami oleh masyarakat pada tingkat lokal. Ada beberapa kendala yang menyebabkan konsep yang bagus tersebut hanya berhenti pada tataran wacana. Kendala-kendala tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

Daerah Alahan Panjang dan sekitarnya (Kabupaten Solok pada umumnya) sejak lama telah dikenal sebagai sentra penghasil sayur dan buah-buahan. Kol, tomat, bawang merah, markisa dan strawberry adalah beberapa komoditas unggulan Kecamatan Lembah Gumanti yang hingga saat ini masih tetap memenuhi kebutuhan kota-kota besar di Sumatera Barat (terutama Padang) serta daerah-daerah tertentu di pulau Jawa (Jakarta). Posisi "tradisional" sebagai daerah penghasil komoditas yang telah disebut diatas pada dasarnya membawa keuntungan dan persoalan sekaligus bagi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Ada ekspektasi yang kuat disini baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat untuk tetap mempertahankan posisi tersebut. Pemerintah daerah dengan otonomi daerah mendapat "angin" untuk tetap mempertahankan posisi tersebut dengan lebih mengedepankan persoalan pendapatan asli daerah (PAD) serta gengsi. Sementara penduduk lokal terus berusaha mempertahankan kesinambungan hidup mereka melalui pola-pola yang telah mereka kenal (yaitu pertanian dan pekebunan).

Otonomi daerah di Solok serta Sumatera Barat pada umumnya, seperti halnya pada banyak kasus di Indonesia, telah melahirkan anak-anak "haram" yang mengatasnamakan ibu mereka untuk mengeksploitasi lingkungan alam

mereka. Kasus *illegal logging* di Solok kian meningkat seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah. Ada beberapa persoalan yang terkait disini pertama pemanfaatan penduduk lokal oleh para cukong, kedua tidak jelasnya batas-batas hak ulayat suatu nagari dan ketiga (hingga tingkatan tertentu) pemberian sebagian urusan pemerintah kabupaten kepada Nagari telah melahirkan semacam anarkisme lokal dalam pengelolaan SDA. Atas nama otonomi daerah dan hak ulayat nagari, penduduk lokal memiliki posisi yang kuat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jika penduduk setempat yang melakukan penebangan kayu maka hampir bisa dikatakan sulit bagi pemerintah daerah untuk melakukan penindakan. Kecenderungan ini dibaca dengan cerdas oleh para cukong kayu, sehingga mereka menyediakan modal bagi penduduk untuk melakukan penebangan liar. Atas nama otonomi daerah pula kegiatan penambangan liar (terutama bahan galian golongan C) kian marak dilakukan oleh penduduk.

Konsep bioregion sebagai sebuah pendekatan dalam pengelolaan SDA (dalam hal ini DAS) hanya dipahami oleh sebagian kecil birokrat pada level kabupaten dan propinsi. Hanya ada satu atau dua orang di level kabupaten yang paham isu ini karena dialah yang terlibat didalam berbagai kegiatan dialog serta penancangan kesepakatan pengelolaan terpadu DAS Batang Hari. Sebagian besar birokrat lain tidak memahami persoalan tersebut. Proses *sharing knowledge* serta penerapannya menjadi sebuah kebijakan yang mengarah pada implementasi konsep bioregion merupakan hal yang hingga saat ini bisa dikatakan tidak pernah dilakukan.

Pasar adalah salah satu faktor penting lain yang sangat perlu mendapat perhatian serius dalam melihat kegagalan konsep bioregion. Seperti telah dijelaskan dimuka ekspektasi terhadap peran sebagai daerah penghasil sayur dan buah- mendapat sambutan yang bagus dari pasar. Petani-petani di Lembah Gumanti dan Solok pada umumnya mempunyai jaringan yang langsung dengan pasar-pasar besar di Jawa dan Sumatera. Mereka mendapatkan informasi tentang kecenderungan pasar tentang komoditas apa yang saat ini paling laku. Mereka menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan sebagai antisipasi terhadap kebutuhan pasar yang semacam itu. Akibatnya penduduk cenderung untuk terus ekspansif dalam membuka lahan. Mereka berusaha untuk memiliki lahan dalam jumlah yang luas sehingga dapat menanam berbagai jenis komoditas sekaligus.

Tampaknya berbagai potensi lokal yang dimiliki oleh penduduk yang berupa praktek-praktek bijak dalam pengelolaan SDA dimasa lalu hingga saat ini masih sebatas pada membangkitkan romantisme masa lalu saja. Prinsip-prinsip mendasar yang dikenal, misalnya *alam takambang menjadi guru*, hanya dipahami sebagai sesuatu yang telah lalu. Upaya-upaya nyata untuk

menghidupkan kebijakan lokal semacam itu masih belum menemukan pijakannya, bahkan ketika pemerintah daerah (Solok) dengan semangat dan pendekatan yang progresif menyerahkan sebagian urusannya kepada Nagari. Meletakkan harapan pada Nagari dengan mengacu pada romantisme masa lalu saja masih belum cukup dalam upaya memelihara lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Barat, 2002, "Laporan Evaluasi Hasil Interpretasi Citra Satelit Kerusakan Lingkungan Daerah Aliran Sungai Batang Hari", Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
- Bagian Proyek Irigasi Batang Hari, Proyek Irigasi dan Rawa Andalan Sumatera Barat, Dinas PSDA Propinsi Sumbar, 2004. "Uraian Singkat Irigasi Batang Hari, Tahapan, Pelaksanaan dan Pendanaan".
- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, 2003, "Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Daerah Aliran Sungai Batang Hari Hulu (Sub DAS Pangean, Sangir, dan Jujuhan)", Departemen Kehutanan.
- Bapenas, 2004. Laporan Bulanan Pelaksanaan Tahap I Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2tpd) Desember 2002.
- BPS, 2002. "Kecamatan Lembah Gumanti dalam Angka"
- BPS Sumatera Barat, 2002. "Sumatera Barat Dalam Angka".
- BPS Sumatera Barat, 2004. "Solok Dalam Angka"
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, 2004. "Program Penyiapan Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2004".
- Haluan, 22/8/2001. "Penebangan dan Pengangkutan Kayu Curian Dilakukan Terang-terangan".
- Haluan, 19/10/2001. "Pencurian Kayu Terus Saja Menggerogoti, Kawasan Hutan Dianggap 'Paru-paru Dunia'".
- Haluan, 311/2001. "Hutan TNKS Dibabat, Cukong-cukong Kayu Bujuk Masyarakat Di Lokasi".
- Haluan, 5/11/2001. "Perambahan Hutan TNKS masih terus Berlangsung".

- Hoogvelt, Ankie, 1985. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta, Rajawali Press.
- Indrizal, Edi, 1994. "Desa-desa Perbatasan TNKS: Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat pedesaan Hutan", Laporan Penelitian PSLH Universitas Andalas.
- Nagari Alahan Panjang, 2004. "Data Dasar Profil Nagari".
- Pemda Kabupaten Solok, 2003. *Handbook of solok*.
- Pemda Kabupaten Solok, 2002, "Rencana Strategis Kabupaten Solok 2001-2005".
- Pemda Kabupaten Solok, 1999/2000. "Penyesuaian Data/Penyempurnaan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok".
- Pemda Kabupaten Solok, 2001. "Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintahan Nagari"
- Pemda Kabupaten Solok, 2001. "SK Bupati Nomor 33 tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Kabupaten Solok dan Nagari"
- Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, 2002. "Renstra Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tahun 2001-2005".
- Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, 2002. "Lampiran Renstra Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tahun 2001-2005".
- Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, 2001. "Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001-2005.
- PSPPSB, 1994. "Kepemimpinan dan Struktur Kekuasaan Lokal dalam Pembangunan: Penelitian di Tiga Desa di Sumatera Barat".
- Pusat Studi Lingkungan Hidup Unand & Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Bukittinggi, 1995. "Laporan Hasil Analisa Data Sosekbud dan Biofisik Rencana Kegiatan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Sumatera Barat".

Release KKI WARSI, 2003. "Kerusakan Hutan Meningkat, Pembangunan Irigasi Sia-sia"

Release KKI WARSI, 2003. "Workshop Regional Jambi-Sumbar Untuk Atasi Banjir"

Release KKI WARSI, 2003. "Megawati, Sentil Sumatera Belum Perhatikan Lingkungan"

Release KKI WARSI, 2003. "Penerapan Reboisasi di Sejumlah Daerah Tidak Tepat"

Scott, James, 1989. *Moral Ekonomi Petani*, Jakarta, LP3ES.

Suara Pembaharuan, 11/3/2003

Syahrawati, MY, 2002. "Kearifan Masyarakat Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (studi kasus daerah perbatasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Koto Parik Gadang Diarah Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat". Tesis, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.

Universitas Andalas, 2002. "Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Laporan Kuliah Kerja Nyata".

Yandri, Efi (ed.), 2003. *Nagari Dalam Perspektif Sejarah*". Lentera 21.

